

**PENGARUH TEKANAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP
PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA**

Diajukan Sebagai Tesis S-2 Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan
Ekonomika Universitas Islam Indonesia.



Disusun Oleh:

NANDA PUTRA AGUSTAYUDHA

Nomor Induk Mahasiswa: 24919022

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 14 Januari 2026

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing



Dr. Mahmudi, S.E., M.Si.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2026 Program Studi Akuntansi Program Magister,
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis
yang disusun oleh :

NANDA PUTRA AGUSTAYUDHA

No. Mhs. : 24919022

Konsentrasi : Akuntansi Pemerintahan

Dengan Judul:

**PENGARUH TEKANAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP
PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim
Penguji, maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Dr. Mahmudi, S.E., M.Si.

Penguji II



Prof. Dr. Hadri Kusuma, M.B.A.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Ariel Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

PERNYATAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : NANDA PUTRA AGUSTAYUDHA
Nomor Induk Mahasiswa : 24919022
Program Studi : Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan
Ekonomika, Universitas Islam Indonesia
Judul Penelitian : PENGARUH TEKANAN PEMANGKU
KEPENTINGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI
INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini merupakan hasil karya asli yang disusun berdasarkan penelitian dan analisis penulis sendiri. Seluruh ide, teori, data, kutipan, maupun pendapat yang berasal dari sumber lain telah dicantumkan dan disitasi dengan benar sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.
2. Artikel ini belum pernah diajukan, dipublikasikan, maupun digunakan sebelumnya pada jurnal, seminar, ataupun kepentingan akademik lainnya.
3. Dengan demikian, penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas keaslian dan kebenaran isi artikel ilmiah ini.



Yogyakarta, 11 Mei 2026

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

Nanda Putra Agustayudha
NIM: 24919022

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

-Q.S Ar-Ra'd: 11-

*“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu,
maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.”*

-HR Tirmidzi-

“Pengetahuan adalah kunci kesuksesan yang tak ternilai”

-Albert Einstein-

*“Hari ini ada peluang yang tidak seorang pun tahu
apakah itu akan datang lagi di masa depan atau tidak.”*

-Christiano Ronaldo-

*“Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia,
jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”*

-Penulis-

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Tesis ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Magister Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, dengan judul ***“Pengaruh Tekanan Pemangku Kepentingan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia”***.

Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam pembuatannya membutuhkan bantuan dari beberapa pihak untuk menyelesaikan tesis ini. Dibutuhkan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, penulis sangat berterimakasih kepada:

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar,
2. Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Sallam yang telah memberikan ilmu dan syafaatnya kepada umat manusia,
3. Kedua orang tua penulis, yaitu Didik Sudibya dan Wahyuningsih, serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa kepada penulis,
4. Bapak Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia,
5. Bapak Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D. selaku Kepala Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia,

6. Bapak Dr. Mahmudi, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dengan meluangkan tenaga, waktu, dan pikiran dalam proses penyusunan tesis,
7. Seluruh dosen dan staff Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia,
8. Teman-teman Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia yang telah berbagi cerita dan pengalaman kepada penulis selama perkuliahan dan membantu menyelesaikan Pendidikan S2 Program Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
9. Kepada Tesis ini sendiri, meskipun dengan begitu banyak keterbatasan dengan hasil yang mungkin tidak sesuai harapan, tetapi penulis percaya ini akan bermanfaat. Jika tidak dapat bermanfaat untuk 10.000 orang maka bermanfaatlah untuk 1.000 orang, jika tidak bisa maka bermanfaatlah untuk 100 orang, jika masih belum bisa maka bermanfaatlah untuk 10 orang, jika masih belum bisa setidaknya bermanfaatlah untuk 1 orang, bahkan jika 1 orang itu adalah penulis sendiri,
10. Kepada 21312182/24919019, penulis menyampaikan terimakasih, bentuk dukungan berupa motivasi, pengertian, dan konsistensi dalam memberikan dorongan positif, telah berkontribusi signifikan terhadap kelancaran penyelesaian tesis ini.
11. Serta, pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu atas bantuan yang telah diberikan.

Dari penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran positif diharapkan oleh penulis dalam mengembangkan tesis, sehingga dapat menjadi sebuah karya tulis yang sempurna dan dapat memberikan manfaat kepada orang lain.

Yogyakarta, 19 September 2025



Nanda Putra Agustayudha

Nomor Induk Mahasiswa: 24919022

DAFTAR ISI

MOTTO.....	3
KATA PENGANTAR.....	6
DAFTAR ISI.....	8
DAFTAR	TABEL
.....	11
DAFTAR GAMBAR.....	12
DAFTAR	LAMPIRAN
.....	13
ABSTRAK.....	14
BAB I.....	15
1.1. Latar Belakang.....	15
1.2. Rumusan Masalah.....	21
1.3. Tujuan Penelitian	21
1.4. Manfaat Penelitian	22
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	22
1.4.2. Manfaat Praktis.....	22
1.5. Sistematika Penulisan	23
BAB II.....	25
2.1. Stakeholder Theory.....	25
2.2. Pemangku Kepentingan.....	26
2.3. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan	28
2.4. Penelitian Terdahulu	30
2.5. Hipotesis 1	34
2.6. Hipotesis 2	36
2.7. Hipotesis 3	38
2.8. Hipotesis 4	40
2.9. Kerangka Penelitian.....	41

BAB III.....	44
3.1. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	44
3.1.1. Jenis Penelitian	44
3.1.2. Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.2. Populasi dan Sampel.....	45
3.2.1. Populasi	45
3.2.2. Sampel	46
3.3. Metode Analisis Data.....	47
3.3.1. Analisis Deskriptif.....	47
3.3.2. Uji Korelasi dan Multikolinerialitas	48
3.3.3. Regresi Linear Berganda	48
3.3.4. Uji Hipotesis	49
3.4. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	52
3.4.1. Tekanan Masyarakat	52
3.4.2. Tekanan Media	53
3.4.3. Tekanan DPRD	54
3.4.4. Tekanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).....	55
3.4.5. Pengungkapan TJSL (Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan).....	55
3.4.6. Skala Pengukuran	56
BAB IV.....	58
4.1. Hasil Penelitian.....	58
4.1.1. Analisis Deskriptif.....	58
4.1.2. Uji Korelasi dan Multikolinearitas	60
4.1.3. Uji Regresi Linear Berganda	61
4.1.4. Uji Hipotesis	64
4.2. Pembahasan	65
BAB V.....	68
5.1. Kesimpulan.....	68
5.2. Implikasi	69
5.2.1. Implikasi Teoritis	69

5.2.2. Implikasi Praktis	70
5.3. Keterbatasan dan Saran	71
REFERENSI.....	73
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 2. Skala Pengukuran setiap Variabel.....	54
Tabel 3. Hasil Uji Deskriptif.....	55
Tabel 4. Matriks Korelasi.....	57
Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	59
Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Penelitian.....	40
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Indeks Pengukuran TJSL.....	74
Lampiran 2. Kabupaten/Kota di Indonesia.....	77

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh tekanan pemangku kepentingan terhadap pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pemerintah daerah di Indonesia. Menggunakan data 514 Kabupaten/Kota dan dilakukan uji regresi berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan masyarakat, pemberitaan media, pengawasan legislatif serta tekanan dari Kementerian Lingkungan Hidup berpengaruh positif terhadap pengungkapan TJSL pada situs resmi pemerintah daerah. Temuan ini menegaskan pentingnya mekanisme akuntabilitas publik dan tekanan institusional dalam meningkatkan transparansi TJSL pemerintah daerah di Indonesia.

Kata Kunci: TJSL, Lingkungan, Sosial, Pemangku Kepentingan.

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of stakeholder pressure on the disclosure of Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSL) by local governments in Indonesia. Using data from 514 regencies/municipalities and multiple regression tests, the results show that community pressure, media coverage, legislative oversight, and pressure from the Ministry of Environment have a positive effect on TJSL disclosure on official local government websites. These findings emphasize the importance of public accountability mechanisms and institutional pressure in improving TJSL transparency among local governments in Indonesia.

Keywords: TJSL, Environment, Social, Stakeholders.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanggung jawab sosial pemerintah tidak muncul dalam ruang hampa, akan tetapi tumbuh dari hubungan yang Tanggung jawab sosial pemerintah tidak muncul saling mempengaruhi antara pemerintah dan masyarakat di sekitarnya. Seiring dengan kemajuan peradaban, masyarakat menjadi semakin sadar akan hak, dampak lingkungan, dan keberlanjutan. Hal ini dipicu oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan yang membuka akses terhadap informasi dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keberlanjutan serta dampak sosial dan lingkungan. Dibutuhkan konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang memiliki berbagai kegiatan sosial untuk dapat berkontribusi positif terhadap masyarakat disekitarnya dan mengurangi dampak negatif yang mungkin dihasilkan dari operasi bisnisnya (Astri, 2012). Menurut Harlyandra & Kafaa (2021) CSR merupakan bentuk upaya dan komitmen berkelanjutan dari entitas bisnis untuk ikut andil dan berkontribusi dalam agenda pembangunan sosial-ekonomi yang lebih bermakna, baik bagi entitas dunia usaha sendiri, pemerintah, masyarakat, maupun lingkungan operasional mereka.

Di Indonesia, persoalan lingkungan hidup menjadi salah satu masalah yang sangat mendesak untuk ditangani supaya tidak memperparah keadaan lingkungan dan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Terdapat peningkatan

kebutuhan akan pelaporan berkelanjutan di sektor publik pada tingkatan pemerintahan, dari tingkat pusat hingga tingkat daerah (Irwadi et al., 2023). Kondisi ini tercermin dari berbagai fenomena yang semakin memprihatinkan, seperti perubahan iklim yang ekstrim, bencana alam, pencemaran udara dan laut, krisis air bersih, kerusakan keanekaragaman hayati akibat tata kelola lahan yang tidak berkelanjutan, termasuk pada aspek pendidikan. Tanggung jawab sosial seseorang atau organisasi adalah etika dan kemampuan berbuat baik pada lingkungan sosial berdasarkan nilai, aturan, dan kebutuhan masyarakat (Amalia, 2020). Argumen lain juga diungkapkan oleh Bahri, yaitu bahwa pemerintah dituntut untuk memiliki kesadaran bahwa mereka memiliki peran aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Saat ini pemangku kepentingan menuntut pemerintah harus bertanggung jawab atas masalah sosial dan lingkungan yang disebabkan, bukan sebaliknya dibebankan pada masyarakat (Musa, 2024).

Subjek penelitian berfokus pada tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dilatar belakangi dengan urgensi dan kompleksitas tantangan lingkungan serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap peran aktif pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik (Sumartias, 2016). Hubungan antara kesadaran masyarakat yang meningkat, kerusakan lingkungan yang semakin luas, dan tekanan pemangku kepentingan membentuk sistem yang saling mempengaruhi. Ketiganya memberikan tekanan yang kuat terhadap transformasi peran pemerintah dalam masyarakat modern. Penelitian yang dilakukan oleh Syahirah et al., (2023) menemukan bahwa

tekanan *stakeholder* dan praktik *good governance* memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya sebagai respon terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat dan tekanan dari para pemangku kepentingan.

Penelitian ini melengkapi literatur dalam kajian pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan sektor publik, khususnya pada pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota di Indonesia. Selama ini, sebagian besar studi terkait pengungkapan TJSL lebih banyak difokuskan pada sektor korporasi atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sementara perhatian terhadap sektor pemerintah masih relatif terbatas. Seperti penelitian yang dilakukan oleh R. Novianti & Meiden (2025), menggunakan perusahaan Index LQ45 dan Index ESD *Leader* dengan hasil penelitian bahwa media berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap pemangku kepentingan (*stakeholder pressure*) sebagai determinan utama dalam mendorong keterbukaan informasi TJSL pada situs resmi pemerintah daerah. Argumen yang diungkapkan oleh Elkington, bahwa dalam organisasi sektor publik seperti pemerintah yang tidak berorientasi pada keuntungan, tanggung jawab sosial dan lingkungan harus menjadi fokus utama karena dampak sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dan industri telah menimbulkan kerusakan bagi bumi (Irwadi et al., 2023). Dalam konteks otonomi daerah dan meningkatnya tuntutan transparan publik, penelitian ini mengisi celah literatur dengan mengkaji bagaimana dorongan dari masyarakat, media, serta lembaga

pengawas mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk lebih aktif mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan secara digital.

Urgensi penelitian ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan dinamika tata kelola pemerintahan di Indonesia yang terus berkembang menuju arah transparansi dan akuntabilitas publik. Seperti yang tertulis dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), bahwa pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah diharapkan mampu menyediakan informasi secara proaktif melalui platform digital atau media lainnya (Sufa et al., 2024). Dalam era digital, situs resmi pemerintah daerah bukan sekedar media informasi, akan tetapi juga menjadi cermin komitmen pemerintah dalam memberikan pertanggungjawaban moral dan sosial kepada masyarakat. Aspek sosial dan lingkungan telah menjadi prioritas utama bagi pemerintah di seluruh dunia, pada tingkat lokal, isu-isu tersebut menjadi perhatian khusus karena pemerintah daerah berperan langsung dalam pelaksanaan berbagai inisiatif yang berkaitan dengan hal tersebut (Irwadi et al., 2023). Terdapat gap yaitu pada peraturan daerah yang seharusnya mengatur mengatur mengenai transparansi dan keterbukaan informasi publik telah dimiliki, namun pada praktiknya belum dilaksanakan di masing-masing unit kerja (Sumartias, 2016). Namun, fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan adanya kesenjangan, yaitu tidak semua pemerintah kabupaten/kota di Indonesia secara konsisten mengungkapkan informasi TJSL, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor apa saja yang mendorong atau menghambat pengungkapan tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait rendahnya tingkat keterbukaan, pengungkapan informasi, serta penyebaran

informasi kepada publik yang mengakibatkan banyak kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat (Sumartias, 2016). Penelitian oleh Perdana et.al. (2025) dalam pengungkapan akuntabilitas pada pemerintah daerah di Indonesia menemukan bahwa kualitas pengungkapan sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik masih menunjukkan perbedaan signifikan antara kabupaten/kota di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, yang mencerminkan ketidakseragaman dalam konsistensi pengungkapan.

Meskipun di Indonesia telah memiliki banyak peraturan terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), seperti UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PP No. 47 Tahun 2012 tentang TJSL, berbagai Peraturan Daerah tentang pengelolaan CSR/TJSPL, serta berbagai pedoman teknis CSR, namun tidak ada satu pun regulasi yang secara tegas mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun dan melaporkan TJSL mereka sendiri. Pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia masih tergolong kurang baik, salah satunya disebabkan oleh tidak adanya kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melaporkan aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungannya secara sistematis, baik dalam bentuk laporan resmi maupun melalui pemberitaan publik. Ketiadaan pelaporan tersebut menyebabkan informasi mengenai pelaksanaan program sosial dan lingkungan oleh pemerintah daerah menjadi terbatas, kurang transparan, serta sulit diakses oleh masyarakat, sehingga akuntabilitas publik atas kegiatan tersebut belum tercapai secara optimal. Namun, sebagaimana ditemukan dalam penelitian Nugraheni et al., (2025) bahwa dalam penerapan akuntabilitas, publik menuntut pemerintah untuk menyediakan informasi yang memenuhi hak masyarakat atas pengetahuan, hak

untuk mendapatkan informasi, serta hak agar aspirasi mereka diakui. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa sebagian besar laporan keberlanjutan di Indonesia masih didominasi oleh sektor bisnis, sementara akuntabilitas keberlanjutan di sektor publik yang justru memegang fungsi pelayanan publik masih sangat terbatas dan belum diatur secara memadai.

Fokus penelitian ini adalah pada tekanan yang datang dari pemangku kepentingan strategis pemerintah daerah, seperti masyarakat, media, DPRD, hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang memiliki pengaruh terhadap pola dan intensitas pengungkapan TJSL. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya melihat pemerintah sebagai pelaksana kewajiban administratif, tetapi juga sebagai entitas yang harus merespons tekanan sosial, politik, dan regulatif dari lingkungan eksternalnya. Tekanan ini berperan sebagai mekanisme pengawasan tidak langsung yang mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengungkapan TJSL. Lebih jauh lagi, dinamika interaksi pemerintah dan pemangku kepentingan ini dapat memicu inovasi kebijakan serta memperkuat tata kelola yang berorientasi pada keberlanjutan. Bagi pemerintah daerah, keterbukaan informasi publik dapat digunakan untuk menyempurnakan pelaksanaan tugas pelayanan publik dan perizinan yang selama ini telah dilakukannya (Sumartias, 2016).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan pendahuluan, maka dapat diajukan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah tekanan dari pemangku kepentingan eksternal berupa tekanan masyarakat dan tekanan media berpengaruh terhadap pengungkapan TJSL di situs resmi pemerintah kabupaten/kota di Indonesia?
2. Apakah tekanan dari pemangku kepentingan internal berupa tekanan DPRD dan tekanan KLHK berpengaruh terhadap pengungkapan TJSL di situs resmi pemerintah kabupaten/kota di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh tekanan pemangku kepentingan eksternal berupa tekanan masyarakat dan tekanan media terhadap pengungkapan TJSL di situs resmi pemerintah kabupaten/kota.
2. Menganalisis pengaruh tekanan pemangku kepentingan internal berupa tekanan DPRD dan tekanan KLHK terhadap pengungkapan TJSL di situs resmi pemerintah kabupaten/kota.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan kajian akademik di bidang Akuntansi Pemerintah dan Tata Kelola Pemerintah Daerah, khususnya dalam konteks transparansi dan akuntabilitas informasi non-keuangan seperti tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selama ini studi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan di pemerintahan masih tergolong terbatas dan masih banyak di sektor non-pemerintahan. Penelitian ini juga memberikan landasan bagi studi lanjutan yang ingin mengeksplorasi keterkaitan dinamika politik, tata kelola informasi publik dan tekanan sosial dalam mendorong perubahan perilaku birokrasi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik yang telah diterapkan. Penelitian ini memberikan gambaran sejauh mana tekanan dari berbagai pihak, baik masyarakat, media, maupun lembaga legislatif, mampu mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam menyediakan informasi TJSL secara digital dan dapat diakses oleh publik. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya budaya transparansi yang tidak hanya bersifat simbolik saja.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang yang menjadi dasar dilakukannya kajian, perumusan masalah yang ingin dijawab, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini.

BAB II: Kajian Pustaka

Bab ini membahas secara mendalam teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, dilengkapi dengan teori pendukung, hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait, kerangka pemikiran yang menjadi landasan penelitian, serta hipotesis yang akan diuji.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menguraikan sistematis langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian, meliputi desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan sesuai kaidah metode penelitian

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang telah diperoleh dan mengaitkannya dengan teori-teori yang relevan maupun hasil penelitian sebelumnya. Pembahasan dilakukan secara mendalam agar hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif.

BAB V: Penutup

Bab terakhir memuat kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian, saran-saran yang dapat diberikan, serta implikasi manajerial atau rekomendasi praktis yang dihasilkan dalam penelitian ini

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Stakeholder Theory

Dalam pemerintahan, *stakeholder theory* mengajarkan bahwa pelayanan publik harus memperhatikan kebutuhan dan harapan dari berbagai pihak, mulai dari warga negara, pegawai pemerintah, lembaga legislatif, hingga komunitas lokal. R.Edward Freeman, yang memperkenalkan teori ini pada tahun 1984, menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan pemerintah sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah mampu membangun hubungan yang adil, etis, dan saling menguntungkan dengan seluruh pemangku kepentingannya. Freeman mengidentifikasi dan memodelkan unit tim yang memperlihatkan pemangku kebutuhan suatu entitas, dan memaparkan serta mereferensikan metode-metode yang dapat digunakan oleh manajemen untuk memperhatikan kebutuhan tim (Subroto & Endaryati, 2023).

Pada perspektif *stakeholder theory*, pengungkapan atau pelaporan merupakan bentuk tanggung jawab dan keterbukaan organisasi kepada publik. Pemerintah atau entitas publik dituntut untuk tidak hanya menyampaikan informasi terkait kinerja keuangan, tetapi juga aspek non-keuangan seperti kinerja lingkungan dan tanggung jawab sosial. *Stakeholder theory* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi pemangku kepentingannya (Kholis, 2020).

Dengan demikian, *stakeholder theory* menekankan pentingnya memperhatikan berbagai kepentingan kelompok pemangku kepentingan yang memiliki potensi untuk mempengaruhi arah dan strategi perusahaan. Teori ini menjadi relevan karena pemangku kepentingan bukanlah pihak luar semata, melainkan bagian integral dari ekosistem perusahaan yang memiliki peran nyata dalam menentukan alokasi dan pemanfaatan sumber daya ekonomi dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Maka dari itu, mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan bukan hanya soal etika, akan tetapi juga merupakan strategi bisnis yang cerdas dan berkelanjutan.

2.2. Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang secara aktif terlibat dalam kegiatan yang dipengaruhi oleh positif dan negatif dari hasil kegiatan (Hidayah et al., 2019). Pendapat lain juga diungkapkan Hetifan bahwa, pemangku kepentingan adalah individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan, terlibat, atau dipengaruhi baik secara positif maupun negatif oleh kegiatan atau program pembangunan (Ardiansyah, 2021). Dalam pengertiannya pemangku kepentingan merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan perusahaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemangku kepentingan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup (*going concern*) perusahaan (Freeman, 1984).

Dari pengertian pemangku kepentingan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemangku kepentingan merupakan individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan keterlibatan dalam suatu kegiatan atau program, serta dapat menerima baik secara positif maupun negatif dari hasil pelaksanaannya. Mereka juga memiliki peran penting dalam mendukung, mengarahkan, bahkan mengkritisi. Penelitian oleh Sawitri & Ardhiani, (2023) menemukan bahwa tekanan *stakeholder* mendorong perusahaan untuk menyusun laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang semakin transparan, sebagai respon atas tuntutan eksternal yang mencakup etika, tanggung jawab sosial, dan aspek regulatif. Sehingga keberadaan pemangku kepentingan perlu diperhatikan dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan, khususnya dalam konteks pembangunan dan tanggung jawab sosial. CSR adalah pertanggungjawaban (*responsibility*) yang mengarah bukan hanya kepada *shareholders* tetapi kepada *stakeholder* juga (Hakim dan Fikri, 2019). Pemangku kepentingan juga memiliki hak untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban sosial dan lingkungan, dalam hal ini adalah pengungkapan TJSL pada situs resmi kabupaten/kota di Indonesia. Dalam GRI *standards* informasi yang tersedia melalui pelaporan keberlanjutan memungkinkan pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk membentuk opini dan mengambil keputusan yang tepat mengenai kontribusi organisasi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (Irwadi et al., 2023).

Menurut Santo & Rahayuningsih, (2022) keberhasilan dari kegiatan bisnis perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan dari para pemangku kepentingan, oleh karena itu segala aktivitas yang dilakukan perusahaan memiliki tujuan untuk mencari

dukungan dari para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Pemangku kepentingan primer

Pemangku kepentingan primer adalah pemangku kepentingan yang terkena dampak secara langsung baik dampak positif maupun dampak negatif dari suatu rencana serta mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut. Pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh dan kepentingan atau pemangku kepentingan primer, harus dilibatkan penuh dalam tahapan-tahapan kegiatan.

2. Pemangku kepentingan sekunder

Pemangku kepentingan sekunder adalah pemangku kepentingan yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu rencana, akan tetapi memiliki kepedulian yang besar terhadap proses pengembangan. Pemangku kepentingan sekunder berkontribusi sebagai penghubung dan pendorong dalam pengembangan kegiatan meskipun tidak terlibat secara langsung.

2.3. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

Tanggung jawab sosial adalah komitmen yang bersifat berkelanjutan dalam dunia bisnis yang menjelaskan para pelaku bisnis harus bertindak etis dan turut andil dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu kelompok maupun masyarakat (Handoko & Santoso, 2023). Pendapat lain juga diungkapkan oleh Kholis (2020) *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan peningkatan

kualitas kemampuan manusia sebagai dan anggota masyarakat dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati, memanfaatkan serta memelihara lingkungan hidup atau dapat dikatakan sebagai proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan bisnis dari *pemangku kepentingan* baik secara internal maupun eksternal. Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) hadir untuk mencegah potensi konflik melalui berbagai cara untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan efek berbahaya yang mungkin timbul (Karjoko et al., 2019).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa TJSL adalah suatu bentuk tanggung jawab sosial yang tidak hanya relevan bagi perusahaan, tetapi juga sangat penting diterapkan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, pemerintah sebagai entitas publik memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Dengan menjalankan tanggung jawab sosial ini, pemerintah tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap prinsip *good governance*, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Dengan adanya CSR, Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab dalam meningkatkan laba, namun juga harus bertanggung jawab terhadap masalah lingkungan, sehingga dapat menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan para *pemangku kepentingan* (Santo & Rahayuningsih, 2022).

Berdasarkan pemahaman mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang tidak terbatas pada sektor korporasi semata, konsep ini sesungguhnya memiliki relevansi yang sangat kuat dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di tingkat pemerintah daerah. CSR bukan hanya instrument etis perusahaan untuk menjaga relasi dengan masyarakat dan lingkungan, tetapi juga dapat ditransformasikan menjadi paradigma kerja pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang lebih partisipatif, adil, dan berkelanjutan. Pelaksanaan CSR diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perbaikan sosial maupun lingkungan masyarakat (Hakim dan Fikri, 2019). Pemerintah daerah sebagai entitas publik memiliki kewajiban moral dan fungsional untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi regional, akan tetapi juga menjamin bahwa proses pembangunan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

2.4. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kerangka konseptual yang dibangun dari penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini hadir dengan memperlihatkan baik persamaan maupun perbedaan sebagai bentuk pengembangan kajian. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Objek	Temuan
1	Pratama & Soenaria, (2024)	Aspek sosial dari pelaporan keberlanjutan pada Pemerintah Kota Bandung.	Isu lingkungan menjadi tekanan besar bagi pemerintah daerah. Terdapat kesenjangan antara kesadaran pemerintah terhadap keberlanjutan dan implementasi kebijakan.
2	Basir et al., (2024)	Pemerintah daerah di Sulawesi Barat, dengan informan dari BPK Sulawesi Barat, bidang perencanaan lingkungan, serta NGO lingkungan.	Isu lingkungan menjadi tekanan besar bagi pemerintah daerah, <i>sustainability report</i> dipandang sebagai instrumen penting untuk transparansi dan akuntabilitas.
3	Ramadhini et al., (2020)	327 laporan dari 109 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2015.	Tekanan eksternal dari kreditur dan eksposur media secara signifikan mendorong pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sementara itu, tekanan dari konsumen dan auditor tidak menunjukkan pengaruh yang kuat.
4	Wahyuningrum et al., (2023)	Perusahaan publik di Indonesia yang menerbitkan <i>sustainability report</i> .	Kualitas <i>sustainability report</i> Indonesia tergolong rendah (53,6%) dibanding negara ASEAN lainnya. Eksposur media yang secara signifikan berhubungan positif dengan

No	Penulis	Objek	Temuan
			kualitas laporan keuangan, tekanan dari stakeholder lain seperti kreditor, auditor, konsumen, industri sensitif maupun pemegang saham tidak memiliki efek signifikan.
5	Syahirah1 et al., (2023)	Perusahaan sektor energi, bahan mentah, industri, dan infrastruktur yang menerbitkan <i>sustainability report</i> di BEI.	Praktik <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan tekanan <i>stakeholder</i> secara kolektif memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> , dengan kontribusi sebesar 77,5%. Hal ini menyiratkan bahwa tekanan sosial dan praktik tata kelola dapat menjadi pendorong yang kuat untuk transparansi.
6	Harsono et al., (2024)	Perusahaan di sektor energi, bahan mentah, industri, dan infrastruktur di BEI yang mengeluarkan <i>sustainability report</i> (2015-2020).	Tekanan stakeholder (pemegang saham, karyawan, pemerintah, media) maupun praktik GCG secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap keterbukaan laporan keberlanjutan. Namun, tekanan dari karyawan menunjukkan pengaruh negatif, menurunnya jumlah karyawan justru

No	Penulis	Objek	Temuan
			meningkatkan pengungkapan <i>sustainability reports</i> , mungkin karena beban perhatian yang lebih mudah dikelola ketika jumlah pegawai lebih sedikit.
7	Wulan, (2025)	Perusahaan publik di indeks yang sensitif terhadap lingkungan (IDX), menganalisis tekanan <i>stakeholder</i> termasuk pemerintah, karyawan, konsumen, dan investor.	Tekanan dari pemerintah dan karyawan terbukti meningkatkan kualitas <i>sustainability report</i> . Sementara tekanan dari konsumen dan investor tidak memiliki pengaruh signifikan. Perusahaan besar dan BUMN dengan jumlah karyawan lebih banyak menunjukkan pelaporan yang baik.
8	Diamastuti et al., (2021)	42 BUMN di Indonesia, melihat peran pemerintah, komitmen organisasi dan eksposur media mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan GCG sebagai mediator.	Peran pemerintah dan komitmen organisasi memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung (melalui GCG) terhadap pengungkapan CSR/CSRD. Namun, peran media hanya efektif ketika melalui mekanisme GCG, secara langsung pengaruh media terhadap pengungkapan tidak signifikan.

No	Penulis	Objek	Temuan
9	Octavio & Urumsah, (2024)	Pemerintah daerah di Indonesia, dengan fokus pada praktik transparansi digital melalui situs resmi daerah.	Tekanan publik merupakan salah satu pendorong penting praktik transparansi pemerintahan lokal.
10	Setiawati et al., (2024)	Pemerintah daerah Klaten, Jawa Tengah, ditinjau dari perspektif hukum bisnis mengenai pengawasan dan peraturan CSR.	Pemerintah daerah mulai membuat kebijakan terkait CSR, namun kurangnya regulasi yang mengikat serta sistem monitoring yang baku mengakibatkan keterbatasan pengungkapan.

2.5. Tekanan Masyarakat Terhadap Pengungkapan TJSL di Situs Resmi Pemerintah Kabupaten/Kota

Secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu/orang yang hidup bersama, masyarakat disebut dengan “*society*” artinya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan, berasal dari kata latin *socius* yang berarti kawan (Prasetyo & Irwansyah, 2020). Masyarakat adalah pemangku kepentingan yang memiliki kekuatan dalam menekan perusahaan untuk melakukan pengungkapan terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilakukan perusahaan Sarra & Alamsyah (2020). Pendapat lain juga diungkapkan oleh Freeman, (1984) bahwa masyarakat menjadi peran penting, karena merupakan

bagian salah satu komponen pemangku kepentingan perusahaan. Tekanan dari masyarakat sebagai pemangku kepentingan dapat dipengaruhi tingkat keterbukaan informasi, khususnya terkait praktik Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Oleh sebab itu semakin tinggi tekanan masyarakat, maka kemungkinan pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan TJSL secara lebih luas juga akan meningkat. Faktor yang mempengaruhi adalah tingkat pendidikan masyarakat, karena pendidikan menjadi modal utama masyarakat untuk mengontrol tindakan pemerintah karena dengan pendidikan masyarakat dapat menyerap berbagai informasi tentang aktivitas pemerintahan yang disajikan oleh media masa (Bararoh, 2011). Variabel tekanan masyarakat terhadap pengungkapan informasi diukur menggunakan rata-rata pendidikan masyarakat karena tingkat pendidikan berhubungan dengan kemampuan kritis, kesadaran hak atas informasi, serta partisipasi masyarakat dalam meminta transparansi.

Penelitian dari Basuki & Patrioty (2009) menemukan bahwa Secara parsial tekanan masyarakat (*community pressure*) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Namun, secara simultan (bersama faktor lain seperti regulasi pemerintah dan tekanan media), pengaruhnya signifikan terhadap CSR disclosure. Penting untuk memahami bahwa peran masyarakat sebagai pemangku kepentingan tidak hanya sebatas memberikan tekanan, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme pengawasan sosial (*social control*) yang memastikan pemerintah daerah menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dari penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, penulis mengharapkan bahwa tekanan masyarakat juga

berpengaruh positif pada pengungkapan TJSL di sektor pemerintahan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: Tekanan eksternal dari masyarakat berpengaruh positif terhadap pengungkapan TJSL pada situs resmi pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

2.6. Tekanan Media Terhadap Pengungkapan TJSL di Situs Resmi Pemerintah Kabupaten/Kota

Media adalah berbagai alat yang dapat digunakan untuk menyimpan dan menyampaikan informasi, seperti buku, alat perekam, surat kabar majalah, bahkan sampai pada jaringan komputer yang sekarang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari (Azzahra, 2022). Mengungkapkan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan melalui media akan membuat nama baik suatu entitas di mata publik meningkat. Melalui media, masyarakat dapat mengawasi aktivitas yang dilakukan perusahaan apakah perusahaan melakukan aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai kontribusi perusahaan melestarikan lingkungan atau tidak (Sarra & Alamsyah, 2020). Pendapat tersebut juga didukung oleh argumen Freeman, (1984) bahwa media dapat membentuk opini masyarakat terhadap perusahaan dan hal tersebut sangat berhubungan erat dengan kepentingan perusahaan, sehingga media juga salah satu kelompok yang menjadi pemangku kepentingan. Penelitian yang dilakukan (Cuadrado-Ballesteros et al., 2017), menemukan bahwa pemerintah

daerah cenderung lebih transparan dibawah tekanan media, terutama terkait informasi tentang isu ekonomi, keuangan, tata kelola, dan pekerjaan publik.

Media tidak hanya menjadi saluran komunikasi satu arah, tetapi juga ruang interaksi yang memungkinkan masyarakat memberikan umpan balik dan kritik terhadap praktik yang dilakukan pemerintah. Kondisi ini menciptakan tekanan reputasi yang mendorong pemerintah untuk semakin transparan dan bertanggung jawab, sekaligus memperkuat hubungan harmonis dengan para pemangku kepentingan. Penelitian yang dilakukan oleh Kasanah et. al (2024) dan Mauliwati (2021), menemukan bahwa tekanan media berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *corporate social disclosure*. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan Tiono et al (2022) bahwa paparan media berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *corporate social disclosure*. Karena dalam era keterbukaan informasi, media tidak hanya menyampaikan berita, akan tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas pemerintahan. Penelitian yang dilakukan oleh (Ceron, 2015), menemukan bahwa masyarakat cenderung memilih berita dari website resmi, karena isinya lebih terstruktur, terverifikasi, dan cenderung mendukung demokrasi yang ada. Dari penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, penulis mengharapkan bahwa tekanan media juga berpengaruh positif pada pengungkapan TJSL di sektor pemerintahan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H2: Tekanan eksternal dari media berpengaruh positif terhadap pengungkapan TJSL pada situs resmi pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

2.7. Tekanan DPRD Terhadap Pengungkapan TJSL di Situs Resmi Pemerintah Kabupaten/Kota

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan (Riana & Kamal Rokan, 2021). Keberadaan DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa pemerintah daerah menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) secara transparansi dan akuntabel. Layaknya dewan komisaris independen dalam korporasi yang berfungsi sebagai pengawas objektif terhadap praktik CSR, DPRD berperan sebagai lembaga legislatif yang memiliki kapasitas untuk menilai, mengkritik, dan memberikan tekanan kepada pemerintah daerah agar mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap kebijakan dan pelaksanaan program. Keberadaan dewan komisaris independen dapat mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik-praktik keberlanjutan yang lebih baik (Rinaldi et al., 2024).

DPRD juga memiliki fungsi anggaran dan legislasi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat implementasi TJSL di daerah. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah tentunya merupakan cerminan terlaksananya *checks and balances* dalam pengelolaan tata pemerintah yang baik (*good governance*) di daerah (Budiyono, 2013). Melalui fungsi pengawasan, DPRD dapat memastikan bahwa alokasi anggaran pembangunan daerah selaras dengan prinsip keberlanjutan dan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi

semata. Selain itu, DPRD dapat mendorong lahirnya regulasi atau peraturan daerah yang mengatur standar transparansi serta publikasi TJSL di situs resmi pemerintah daerah. Dengan peran tersebut, DPRD tidak hanya menjadi pengawas pasif, tetapi juga aktor aktif yang berkontribusi dalam pembangunan tata kelola yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Penelitian dari N. Novianti & Eriandani (2022) menemukan bahwa pengaruh ukuran komisisaris positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. Penelitian tersebut sejalan dengan Rinaldi et al (2024) yang menemukan bahwa dewan komisisaris independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Dengan memiliki anggota yang kompeten dalam isu-isu sosial dan lingkungan, maka DPRD dapat mendorong terwujudnya keterbukaan dalam pengungkapan program TJSL. Dari penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, penulis mengharapkan bahwa tekanan DPRD juga berpengaruh positif pada pengungkapan TJSL di sektor pemerintahan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H3: Tekanan internal dari DPRD berpengaruh positif terhadap pengungkapan TJSL pada situs resmi pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

2.8. Tekanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Terhadap Pengungkapan TJSL di Situs Resmi Pemerintah Kabupaten/Kota

Kementerian Lingkungan Hidup adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup (KLHK, 2025). Tekanan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dapat dipandang sebagai pengaruh yang positif bagi pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) di situs resmi mereka. KLHK tidak hanya berfungsi sebagai regulator, akan tetapi juga sebagai pendorong pemerintah daerah untuk lebih transparan dan akuntabel, serta adaptif terhadap tuntutan keberlanjutan. Tekanan yang diberikan bisa berbagai macam, baik regulasi, evaluasi, bahkan penghargaan lingkungan seperti PROPER dan Adipura, menumbuhkan kesadaran bahwa pengungkapan TJSL bukan sekedar formalitas, melainkan bentuk kepercayaan dan komitmen nyata pemerintah daerah terhadap pembangunan berkelanjutan. Penelitian oleh Aryanti dkk, (2023) menemukan bahwa kinerja lingkungan dengan PROPER dapat memberikan pengaruh secara signifikan terhadap CSR. KLHK juga berperan sebagai mekanisme pengawasan yang mendorong pemerintah daerah untuk lebih konsisten dalam melaporkan aktivitas lingkungan secara terbuka.

Kinerja lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR (Kustina & Hasanah, 2020). Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh Suryadi dan Lestari (2018) bahwa secara parsial variabel penghargaan berpengaruh signifikan terhadap *Islamic Social Report*. Adapun penelitian oleh Istifaroh & Subardjo, (2017)

menemukan bahwa Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan CSR, argumen ini juga didukung bahwa PROPER sendiri memiliki fungsi sebagai alat untuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat (Kinara dan Darmaji, 2013). Dari penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, penulis mengharapkan bahwa tekanan KLHK juga berpengaruh positif pada pengungkapan TJSL di sektor pemerintahan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H4: Tekanan internal dari KLHK berpengaruh positif terhadap pengungkapan TJSL pada situs resmi pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

2.9. Kerangka Penelitian

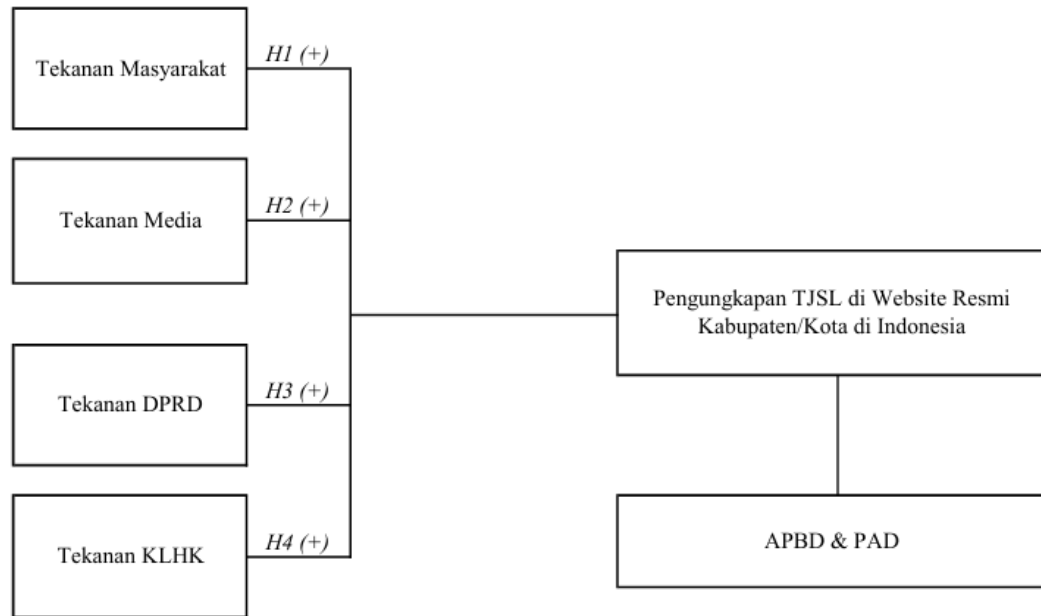
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, termasuk dalam hal pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pemerintah kabupaten/kota sebagai entitas publik memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai berbagai aktivitas sosial dan lingkungan, salah satunya adalah melalui pengungkapan melalui situs resmi pemerintah kabupaten/kota. Akan tetapi, tingkat pengungkapan TJSL di situs resmi pemerintah daerah sangat bervariasi. Salah satu faktor yang dapat menjelaskan variasi ini adalah adanya tekanan dari pemangku kepentingan internal seperti masyarakat dan media, serta pemangku kepentingan eksternal seperti DPRD, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tekanan dari

pemangku kepentingan ini mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi melalui TJSL.

Variasi tingkat pengungkapan TJSL juga mencerminkan perbedaan kapasitas dan komitmen pemerintah daerah dalam merespon tekanan pemangku kepentingan. Daerah yang mampu mengelola tekanan tersebut secara konstruktif biasanya lebih proaktif dalam menyediakan informasi yang lengkap, mudah diakses, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik. Sebaliknya, daerah yang kurang responsif cenderung menampilkan informasi yang terbatas dan hanya formalitas. Oleh karena itu, keberadaan tekanan dari berbagai pemangku kepentingan dapat dipandang sebagai instrumen penting untuk mendorong terwujudnya praktik tata kelola pemerintahan yang baik, dengan pengungkapan TJSL menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam membangun kepercayaan publik.

Setiap variabel dipilih berdasarkan landasan teoritis dan temuan empiris terdahulu, sehingga mampu menjelaskan fenomena yang menjadi fokus penelitian secara komprehensif. Dengan menyusun kerangka konsep secara sistematis, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana variabel-variabel tersebut saling mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta memberikan kejelasan mengenai kontribusi masing-masing variabel terhadap hasil penelitian. Berikut kerangka konsep penelitian yang akan dilakukan:

Gambar 1. Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu data yang menggambarkan hasil perhitungan atau pengukuran yang dijabarkan dalam bentuk numerik, sehingga data kuantitatif sering disebut juga dengan data numerik (Soesana et al., 2023). Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk angka, sehingga dapat dianalisis menggunakan teknik statistik untuk melihat, pola, hubungan, maupun pengaruh antar variabel.

3.1.2. Teknik Pengumpulan Data

Secara teoritis, proses dalam pengumpulan data sangat berperan dalam menentukan validitas hasil penelitian. Adapun jenis pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan data sekunder, yaitu data yang tersedia sebelumnya yang dikumpulkan dari sumber-sumber tidak langsung atau tangan kedua misalnya sumber-sumber tertulis milik pemerintah atau perpustakaan (Hardani et al., 2020).

Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan oleh peneliti untuk mencari pengungkapan TJSL adalah melalui website resmi pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia, variabel tekanan masyarakat diperoleh dari publikasi BPS terkait rata rata pendidikan masyarakat di indonesia, variabel

tekanan media diperoleh dari jumlah pemberitaan negatif pemerintah dari media nasional dan media lokal ternama melalui situs web media tersebut, variabel tekanan KLHK diperoleh dari surat pemenang penghargaan dan data yang diambil adalah jumlah jenis penghargaan yang didapat Kabupaten/Kota, Variabel tekanan DPRD diambil dari surat putusan kursi DPRD.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek/subjek penelitian yang ditetapkan oleh peneliti (Machali, 2021). Pendapat lain juga diungkapkan oleh Margono (2004), bahwa populasi adalah keseluruhan objek/subjek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber daya yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian (Hardani et al., 2020). Populasi adalah semua nilai, baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kualitatif maupun kuantitatif, dari karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas.

Berdasarkan pada pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi dalam suatu penelitian mencakup keseluruhan objek yang menjadi fokus kajian, baik berupa individu, benda, fenomena, nilai, hasil tes, maupun peristiwa tertentu. Populasi tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya, tetapi

juga sebagai pondasi utama yang akan menggambarkan kecenderungan umum dari variabel yang dikaji.

3.2.2. Sampel

Sampel adalah sebagian elemen yang diambil dari populasi yang dijadikan subjek penelitian (Waruwu et al., 2025). Sampel merupakan sebagian kecil dari populasi yang dipilih secara cermat untuk mewakili keseluruhan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini merupakan bagian dari populasi yang diambil dengan tujuan untuk menggambarkan keseluruhan populasi secara representatif, pemilihan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan kecocokan karakteristik, ketersediaan data, serta relevansinya terhadap penelitian. Melalui teknik sampling yang tepat, peneliti tetap dapat memperoleh gambaran yang valid dan reliabel mengenai populasi secara keseluruhan.

Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Non-Probability Sampling*, yaitu teknik sampling yang tidak memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Hardani et al., 2020). Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan sampel jenuh, yaitu teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Abdullah et al., 2022). Dengan demikian, maka sampel yang dibutuhkan untuk penelitian ini sebanyak 416 kabupaten dan 97 kota yang tercatat resmi pada tahun 2024. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan analisis yang dihasilkan menjadi

lebih representatif, mendalam, dan akurat, karena seluruh data yang ada dalam populasi telah dianalisis secara menyeluruh. Selain itu, penggunaan sampel jenuh juga memperkuat validitas penelitian karena tidak ada penyaringan yang dapat menimbulkan distorsi data.

3.3. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu tahapan paling utama dilakukan seorang peneliti untuk mencari dan menemukan sebuah hasil yang diharapkan berdasarkan data yang telah dikumpulkan (Abdullah et al., 2022). Dari penjelasan di atas, maka analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah:

3.3.1. Analisis Deskriptif

Pada analisis kualitatif deskriptif, dari seluruh data yang diperoleh dikonstruksi dan dibuat kesimpulan untuk memberikan gambaran atau petunjuk dan biasanya analisis deskriptif dilakukan karena data sangat besar seperti sensus penduduk atau sensus ekonomi (Soesana et al., 2023). Analisis statistik deskriptif menghasilkan gambaran hubungan sebab-akibat antara dua jenis variabel, yakni variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Variabel bebas berperan sebagai faktor pemicu yang mempengaruhi terjadinya perubahan, sementara variabel terikat merupakan hasil atau dampak dari perubahan tersebut.

3.3.2. Uji Korelasi dan Multikolinerialitas

Sebelum melakukan analisis regresi, perlu dilakukan uji korelasi antar variabel independen untuk melihat ada tidaknya hubungan yang terlalu kuat (*collinearity*). Jika dua atau lebih variabel bebas sangat berkorelasi, maka hasil regresi dapat menjadi tidak stabil karena sulit membedakan pengaruh masing-masing variabel. Maka dari itu, perhitungan *Variance Inflation Factor* (VIF) diperlukan untuk mendeteksi masalah multikolineritas. VIF yang terlalu tinggi menunjukkan bahwa suatu variabel membawa informasi yang tumpang tindih dengan variabel lain, sehingga perlu dihapus atau ditransformasi.

1. Jika nilai $VIF < 10$ atau nilai *Tolerance* > 0.10 , maka dinyatakan tidak terjadi multikolineritas.
2. Jika nilai $VIF > 10$ atau nilai *Tolerance* < 0.10 , maka dinyatakan terjadi multikolineritas.
3. Jika koefisien korelasi masing-masing variabel bebas > 0.8 maka terjadi multikolineritas. Tetapi jika koefisien korelasi masing-masing variabel bebas < 0.08 maka tidak terjadi multikolineritas.

3.3.3. Regresi Linear Berganda

Regresi dalam penelitian kuantitatif adalah metode statistik yang digunakan untuk memeriksa hubungan antara variabel dependen dan independen (Iba & Wardhana, 2024). Regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan

variabel dependen (Indartini & Mutmainah, 2024). Metode ini berperan penting dalam membantu peneliti memahami seberapa besar dan bagaimana arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang sedang diteliti. Dalam konteks analisis regresi, terdapat dua jenis variabel utama yang menjadi fokus, yaitu variabel dependen sebagai hasil atau nilai yang ingin diprediksi, serta variabel independen sebagai faktor-faktor yang digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi perubahan pada variabel dependen.

3.3.4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menilai kebenaran suatu asumsi atau dugaan tertentu, serta menarik kesimpulan apakah hipotesis tersebut layak diterima atau harus ditolak. Hipotesis pada dasarnya merupakan pernyataan dugaan yang diajukan untuk menjawab suatu permasalahan penelitian (Nuryadi, 2017). Pengujian dilakukan dengan menggunakan *Significant level* = $***p < 0.01$ (pada kategori ini, hasil penelitian disebut sangat signifikan, sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat diyakini sangat kuat secara statistik.), $**p < 0.05$, (hasil pengujian dianggap signifikan, sehingga hipotesis alternatif dapat diterima), $*p < 0.1$ (hipotesis bisa diterima namun dengan tingkat keyakinan yang lebih rendah). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Menentukan H0 dan HA:

a. Pengujian X_1 :

H0: $\beta_1 = 0$: Tidak terdapat pengaruh tekanan masyarakat terhadap pengungkapan TJSL di situs resmi pemerintah kabupaten/kota.

HA: $\beta_1 \neq 0$: Terdapat pengaruh tekanan masyarakat terhadap pengungkapan TJSL di situs resmi pemerintah kabupaten/kota.

b. Pengujian X_2 :

H0: $\beta_2 = 0$: Tidak terdapat pengaruh tekanan media terhadap pengungkapan TJSL di situs resmi pemerintah kabupaten/kota.

HA: $\beta_2 \neq 0$: Terdapat pengaruh tekanan media terhadap pengungkapan TJSL di situs resmi pemerintah kabupaten/kota.

c. H Pengujian X_3 :

H0: $\beta_3 = 0$: Tidak terdapat pengaruh tekanan DPRD terhadap pengungkapan TJSL di situs resmi pemerintah kabupaten/kota.

HA: $\beta_3 \neq 0$: Terdapat pengaruh tekanan DPRD terhadap pengungkapan TJSL di situs resmi pemerintah kabupaten/kota.

d. Pengujian X_4 :

$H_0: \beta_4 = 0$: Tidak terdapat pengaruh tekanan KLHK terhadap pengungkapan TJSL di situs resmi pemerintah kabupaten/kota.

$H_A: \beta_4 \neq 0$: Terdapat pengaruh tekanan KLHK terhadap pengungkapan TJSL di situs resmi pemerintah kabupaten/kota.

2. Bila nilai signifikan $t < 0,01, 0,05$, dan $0,1$ maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
3. Bila nilai signifikan $t > 0,1$ maka H_0 diterima, artinya tidak dapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

Adapun rumus yang digunakan yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 K_1 + \beta_6 K_2 + \varepsilon$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_5 K_1 + \beta_6 K_2 + \varepsilon$$

$$Y = \alpha + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 K_1 + \beta_6 K_2 + \varepsilon$$

Dimana:

Y = Pengungkapan TJSL di Website Resmi Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.

α = Konstanta.

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi.

X_1 = Tekanan Masyarakat.

X_2 = Tekanan Media.

X_3	=	Tekanan DPRD.
X_4	=	Tekanan KLHK
K_1	=	APBD.
K_2	=	PAD.
E	=	Error Term.

3.4. Definisi Operasional Variabel Penelitian

3.4.1. Tekanan Masyarakat

Tekanan dari masyarakat lokal terbukti memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja lingkungan perusahaan, karena perusahaan merespons ekspektasi sosial serta aktivitas terhadap Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (Heyes & Kapur, 2012). Tekanan dari masyarakat lokal tidak hanya relevan dalam konteks pemerintahan, tetapi juga memiliki implikasi yang kuat dalam praktik pengelolaan pemerintahan, khususnya dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh pemerintah daerah.

Masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap isu sosial dan lingkungan cenderung menuntut pemerintah untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi terkait dampak kebijakan pembangunan terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial. Dengan akses literasi dan informasi yang lebih baik, masyarakat mampu mengidentifikasi potensi risiko, mempertanyakan keputusan yang tidak transparan, serta menuntut penjelasan yang lengkap dan berbasis data. Dalam konteks ini, tekanan masyarakat menjadi lebih kuat karena mereka tidak hanya mengandalkan

proses formal, tetapi juga memanfaatkan ruang digital untuk menggalang dukungan dan memperbesar suara kolektif.

3.4.2. Tekanan Media

Sebagai pilar demokrasi, media berfungsi memberikan informasi, meningkatkan kesadaran masyarakat dan menjadi instrumen kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Raifangga et. al, 2025). Basuki & Patrioty (2009) mengungkapkan bahwa media dapat menyediakan informasi bagi perusahaan dan dapat pula sebagai alat publikasi dan sosialisasi yang digunakan oleh perusahaan untuk dapat membangun kepercayaan publik tentang aktivitas-aktivitas sosial yang dijalankan perusahaan.

Keberadaan media, baik lokal maupun nasional berkontribusi dalam membentuk opini masyarakat dan menyoroti aspek transparansi serta akuntabilitas pemerintah daerah. Ketika media aktif memberitakan isu-isu sosial, lingkungan atau kelalaian pemerintah dalam menjalankan fungsi sosialnya maka akan mendorong pemerintah daerah dalam merespon berupa peningkatan dan frekuensi pengungkapan TJSL di situs resmi mereka. Sehingga, semakin tinggi tekanan media, maka akan semakin besar dorongan bagi pemerintah daerah untuk mempublikasikan TJSL secara lebih terbuka sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.

3.4.3. Tekanan DPRD

Dengan wewenang yang dimiliki, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen untuk mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial (Wijaya, 2012). Komisaris yang bukan merupakan pihak dengan perusahaan disebut dengan dewan komisaris independen, yang bertugas melakukan monitoring terhadap direksi dalam hal pengungkapan CSR (N. Novianti & Eriandani, 2022). Dalam konteks tata kelola pemerintah, peran DPRD memiliki kesetaraan fungsional dengan dewan komisaris dalam dunia korporasi, khususnya dalam hal fungsi pengawasan dan pengaruh terhadap transparansi informasi publik, termasuk pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Tekanan politik dan sosial yang diberikan DPRD melalui forum rapat, rekomendasi resmi, pembahasan APBD, berpotensi menjadi pendorong utama dalam memperkuat akuntabilitas pemerintah terhadap publik. Bahkan dalam banyak kasus, desakan DPRD mampu memaksa eksekutif untuk mengintegrasikan aspek TJSL dalam dokumen perencanaan strategis daerah seperti RPJMD dan RKPD. Dengan demikian, DPRD tidak hanya bertindak sebagai lembaga legislatif pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai berkelanjutan.

3.4.4. Tekanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah lembaga pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK, 2025). Regulasi sebagai faktor yang mendorong penyusunan kebijakan dalam pengungkapan TJSL pada sebuah institusi (Herlina et al., 2016). Dalam penelitian ini tekanan KLHK didefinisikan sebagai bentuk regulasi, evaluasi, dan dorongan kebijakan yang diterapkan KLHK untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota di Indonesia untuk meningkatkan pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) melalui situs resmi masing-masing daerah. Pengaruh tekanan ini diuji terhadap tingkat komprehensif dan ketepatan penyajian informasi TJSL di situs resmi pemerintah kabupaten/kota yang meliputi: keberadaan laporan, kelengkapan data, dan kemudahan akses.

3.4.5. Pengungkapan TJSL (Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan)

Perusahaan harus menyadari pentingnya CSR dilandasi dengan pemikiran bahwa perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban ekonomi dan legal kepada pemegang saham (*shareholder*), tapi juga memiliki kewajiban kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*) (Santo & Rahayuningsih, 2022). Menurut Rinaldi et al (2024) CSR mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan keberlanjutan dalam semua aspek bisnisnya, dengan memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, seperti karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungan.

Selain itu, pelaksanaan CSR yang baik dapat membantu perusahaan mengurangi risiko sosial dan lingkungan, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi agenda global. Dengan demikian CSR bukan sekedar kewajiban moral, tetapi juga strategi bisnis yang dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan masyarakat.

Dalam praktiknya, tanggung jawab tersebut perlu diungkapkan secara terbuka melalui pengungkapan CSR, yaitu penyampaian informasi kepada publik mengenai program, kebijakan, dan hasil kegiatan sosial dan lingkungan yang telah dilakukan perusahaan atau lembaga publik. Pada sektor pemerintahan, pengungkapan TJSL dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, membangun kepercayaan masyarakat, serta menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus dalam pembangunan fisik dan ekonomi saja, akan tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

3.4.6. Skala Pengukuran

Untuk memperoleh hasil penelitian yang objektif, setiap variabel dalam penelitian ini diukur dengan skala yang sesuai dengan karakteristik datanya. Dengan menggunakan skala pengukuran yang tepat, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data yang valid, reliabel, dan mampu menggambarkan pengaruh tekanan pemangku kepentingan terhadap tingkat pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pemerintah daerah secara lebih akurat. Maka skala pengukuran dari setiap variabel adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Skala Pengukuran setiap Variabel

No	Variabel	Indikator Perhitungan
1	Pengungkapan TJSL di Situs Resmi Pemerintah Kabupaten/Kota	Indeks.
2	Tekanan Masyarakat	Rata-rata pendidikan masyarakat Kabupaten/Kota tahun 2024.
3	Tekanan Media	Jumlah pemberitaan negatif di kabupaten/kota dalam tahun 2024 pada situs web resmi media.
4	Tekanan DPRD	Jumlah anggota DPRD tahun 2024.
5	Tekanan KLHK	Jumlah penghargaan yang didapat. Pada tahun 2024.
6	Tingkat APBD	Jumlah anggaran APBD tahun 2024.
7	Tingkat PAD	Jumlah PAD tahun 2024.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis serta menggambarkan data berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian analisis statistik deskriptif diolah menggunakan aplikasi StataMP17, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
TJSL	513	6.797	4.887	0	18
Masyarakat	513	8.107	2.587	0	13.1
Media	513	0.929	1.705	0	13
DPRD	513	34.327	10.275	12	55
KLHK	513	0.957	0.913	0	3
APBD	513	4.50e+12	8.20e+12	1.83e+11	1.40e+14
PAD	513	4.75e+11	2.37e+11	4.07e+09	5.07e+13

Sumber: Hasil data yang diolah StataMP17

Berdasarkan hasil uji deskriptif, pengungkapan TJSL pada website resmi pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki jumlah observasi sebanyak 513 sehingga seluruh analisis menggunakan data yang konsisten antar variabel. Nilai rata-rata TJSL tercatat 6.797 dengan standar deviasi

4.887, yang menunjukkan adanya penyebaran nilai yang cukup lebar diantara sampel penelitian, dibuktikan dengan perbedaan antara nilai minimum 0 dan maksimum 18.

Variabel masyarakat juga menunjukkan variasi yang cukup kuat. Nilai rata rata sebesar 8.107 dengan standar deviasi 2.587 mengindikasi nilai tekanan masyarakat tidak hanya bervariasi tetapi juga memiliki kecenderungan berada pada level sedang ke tinggi, karena nilai maksimum mencapai 13.1, sedangkan nilai minimum tetap berada pada 0. Variabel tekanan media memiliki rata-rata 0.929 yang relatif rendah dibanding variabel lainnya, dengan standar deviasi 1.705. Keberadaan nilai maksimum 13 mengindikasikan bahwa terdapat kasus dengan tekanan media tinggi, namun nilai minimum berada di angka 0.

Variabel tekanan dari DPRD menunjukkan nilai rata-rata paling tinggi dibandingkan variabel tekanan pemangku kepentingan lainnya, yaitu 34.327 dengan standar deviasi 10.275. Rentang nilai dari 12 hingga 55 mencerminkan bahwa DPRD memiliki peran yang relatif dominan dalam mendorong isu TJSL, serta memberikan tekanan politik yang lebih kuat dibandingkan masyarakat, media, maupun KLHK. Sementara itu, variabel tekanan dari KLHK memiliki rata-rata 0.957 dengan standar deviasi 0.913. Nilai minimum 0 dan maksimum 3 menunjukkan variasi yang sangat terbatas, sehingga tekanan KLHK umumnya berada pada tingkat rendah hingga moderat dan jauh kurang intens dibanding tekanan dari DPRD.

4.1.2. Uji Korelasi dan Multikolinearitas

Uji korelasi digunakan untuk memastikan apakah variabel independen memiliki hubungan yang berarti dengan variabel dependen sebelum dimasukkan ke dalam analisis regresi. Sementara, uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang kuat antar variabel independen dalam model. Berikut adalah tabel korelasi antara variabel bebas dan terikat yang diolah menggunakan aplikasi StataMP17:

Tabel 4. Matriks Korelasi

	VIF	TJSL	Masyarakat	Media	DPRD	KLHK	APBD	PAD
TJSL	-	1.000						
Masyarakat	1.06	0.129	1.000					
Media	1.06	0.170	0.061	1.000				
DPRD	1.19	0.258	0.089	0.194	1.000			
KLHK	1.28	0.196	0.213	0.085	0.363	1.000		
APBD	1.65	0.059	0.152	0.070	0.088	0.283	1.000	
PAD	1.58	0.184	0.114	0.144	0.299	0.144	0.656	1.000

Sumber: *Hasil data yang diolah StataMP17*

Pada hasil tabel korelasi terlihat bahwa nilai korelasi antar variabel relatif rendah, misalnya korelasi antara Masyarakat dan Media sebesar 0.061, antara DPRD dan Media 0.194, serta antara KLHK dan DPRD 0.363. Korelasi terbesar tercatat antara PAD dan APBD sebesar 0.656, namun angka ini masih jauh di bawah ambang batas korelasi tinggi ($r > 0.8$). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar variabel independen dalam penelitian tidak terlalu kuat, sehingga risiko multikolinearitas relatif kecil.

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh nilai VIF berada dibawah angka 2 dengan nilai tertinggi hanya 1.65 pada variabel APBD dan 1.58 pada variabel PAD. Angka-angka ini berada jauh dibawah ambang batas umum 10 yang sudah ditetapkan. Temuan ini mengindikasikan bahwa variabel-variabel independent tidak mengindikasikan gejala multikolinearitas yang dapat mengganggu kestabilan estimasi koefisien. Dengan demikian, model regresi dapat dinyatakan memenuhi bebas multikolinearitas, sehingga seluruh variabel independen layak dipertahankan tanpa memerlukan transformasi, pengurangan variabel, maupun penggunaan metode regresi alternatif.

4.1.3. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (Masyarakat, Media, DPRD, KLHK) terhadap variabel dependen (TJSL). Pada uji ini, penulis mengembangkan 3 model yaitu: model 1 adalah semua variabel diuji bersama-sama dengan variabel kontrol, model 2 adalah variabel pemangku kepentingan eksternal diuji dengan variabel kontrol, dan model 3 adalah variabel pemangku kepentingan internal diuji dengan variabel kontrol. Berikut ini merupakan tabel analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan aplikasi StataMP 17:

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Model 1 Coef	t-stat	Model 2 Coef.	t-stat	Model 3 Coef.	t-stat
<i>Panel A. Tekanan Pemangku Kepentingan</i>						
Masyarakat	0.162**	1.98	0.219**	2.64	-	-
Media	0.354***	2.85	0.478***	3.81	-	-
DPRD	0.090***	4.12	-	-	0.102***	4.70
KLHK	0.530**	2.08	-	-	0.620**	2.44
<i>Panel B. Variabel Kontrol</i>						
APBD	1.160	0.34	4.340	1.26	1.070	0.31
PAD	-8.590	-0.74	-1.370	-1.14	-3.420	-0.29
<i>Panel C. Model Fit</i>						
R-squared	0.101		0.046		0.079	
F-statistic	9.480		6.200		10.89	
Prob.	0.000		0.000		0.000	
Observations	513		513		513	

Sumber: Hasil data yang diolah StataMP17

Hasil regresi linear berganda disajikan dalam tiga model untuk menguji pengaruh masing-masing pemangku kepentingan terhadap pengungkapan TJSL pada situs resmi pemerintah Indonesia Kabupaten/Kota di Indonesia. Pada model 1, seluruh variabel tekanan pemangku kepentingan dianalisis, yaitu tekanan masyarakat, tekanan media, tekanan DPRD, dan tekanan KLHK. Hasil menunjukkan variabel tekanan masyarakat memiliki koefisien sebesar 0.162 dengan t-stat 1.98 dan signifikan pada level $p < 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tekanan masyarakat berpengaruh

positif terhadap pengungkapan TJSL. Selanjutnya variabel tekanan media menunjukkan koefisiensi 0.354 dengan t-stat 2.85 dengan level signifikan $***p < 0.01$, menandakan bahwa semakin besar pemberitaan media, maka semakin tinggi Tingkat pengungkapan TJSL. Variabel tekanan DPRD dan KLHK juga menunjukkan hubungan positif signifikan, masing-masing dengan koefisien 0.090 dan 0.530 serta t-stat 4.12 dan 2.08, dimana keduanya signifikan pada $***p < 0.01$ dan $**p < 0.05$.

Model 2 dan model 3 disusun untuk melihat pengaruh variabel spesifik. Model 2 menguji variabel tekanan eksternal yaitu media dan masyarakat, sedangkan model 3 menguji tekanan internal yaitu DPRD dan tekanan KLHK. Pada model 2, koefisien masyarakat sebesar 0.219 dengan t-stat 2.64, dan koefisien media sebesar 0.468 dengan t-stat sebesar 3.81. Sedangkan pada model 3 variabel DPRD dan KLHK tetap signifikan masing-masing koefisien 0.102 dengan t-stat sebesar 4.70 dan koefisien 0.620 dengan t-stat sebesar 2.44. Dari segi *goodness of fit*, nilai *R-square* berkisar antara 0.046 hingga 0.101, sementara seluruh model menunjukkan nilai *F-statistic* signifikan (Prob = 0,000), sehingga model secara keseluruhan dinyatakan fit.

4.1.4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan metode untuk menguji kebenaran suatu pernyataan dengan menggunakan data. Berikut ini merupakan tabel uji hipotesis yang diolah menggunakan aplikasi StataMP 17:

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	p-Value	β	Keputusan
Tekanan Masyarakat	0.048**	0.162	H1 didukung
Tekanan Media	0.005***	0.354	H2 didukung
Tekanan DPRD	0.000***	0.090	H3 didukung
Tekanan KLHK	0.038**	0.530	H4 didukung

Sumber: Hasil data yang diolah StataMP17

Berdasarkan uji hipotesis yang menggunakan tingkat signifikansi $***p < 0.01$, $**p < 0.05$, $*p < 0.10$, variabel tekanan masyarakat memiliki p-value .048 serta dinyatakan signifikan pada level $**p < 0.05$ dalam tabel keterangan signifikansi sehingga hipotesis H1 dinyatakan diterima. Tekanan media memiliki p-value sebesar 0.005 dan signifikan pada $***p < 0.01$, sehingga H2 diterima. Variabel tekanan DPRD memiliki p-value 0.000 yang berada pada level $***p < 0.01$, sehingga hipotesis H3 diterima. Demikian pula tekanan KLHK memiliki p-value 0.038 dan signifikan pada $**p < 0.05$, sehingga hipotesis H4 diterima. Secara keseluruhan, seluruh hipotesis terkait pengaruh tekanan pemangku kepentingan terhadap TJSL dinyatakan diterima sesuai data empiris yang ditampilkan dalam tabel.

4.2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan dari pemangku kepentingan berpengaruh signifikan terhadap tingkat implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada pemerintah daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pelaksanaan TJSL tidak hanya ditentukan oleh faktor administratif, tetapi sangat dipengaruhi oleh tekanan sosial dan institusional yang datang dari lingkungan eksternal pemerintah. Tekanan tersebut dapat berupa dorongan politik, tuntutan masyarakat, pengawasan legislatif, maupun ekspektasi regulatif dari lembaga pemerintah pusat. Pemangku kepentingan sekunder atau eksternal dapat mempengaruhi keputusan organisasi dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Thijssens dkk, 2015). Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa tekanan eksternal berperan penting sebagai mekanisme pendorong dalam komitmen pemerintah terhadap isu sosial dan lingkungan.

Tekanan masyarakat terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan TJSL, sejalan dengan penelitian (Basuki & Patrioty 2009). Penelitian lain yang dilakukan (Fidiana, 2022) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari tekanan publik dengan pengungkapan lingkungan. Temuan ini mengindikasikan bahwa meningkatnya perhatian dan sensitivitas publik terhadap isu sosial maupun lingkungan akan mendorong pemerintah daerah untuk memperluas serta memperbaiki kualitas pengungkapan TJSLnya. Implementasi TSJL kemudian menjadi salah satu sarana penting bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan publik, dan keberlangsungan lingkungan.

Tekanan media terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan TJSL, sejalan dengan penelitian (Mauliwati, 2021). Penelitian lain yang dilakukan Ramadhini et al., (2020) menunjukkan bahwa *media exposure* berpengaruh positif terhadap pengungkapan TJSL. Temuan ini menunjukkan bahwa pemberitaan melalui website resmi dapat berfungsi sebagai instrumen pengawasan sosial yang sangat efektif bagi pemerintah daerah. Ketika suatu isu mendapat sorotan luas, pemerintah daerah akan menghadapi tekanan moral, politik, dan sosial untuk merespons secara nyata melalui peningkatan kualitas maupun jumlah program TJSL. Pemberitaan negatif dapat merusak citra institusi, sedangkan pemberitaan positif dapat meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pemerintah seringkali terdorong untuk menampilkan kinerja sosial dan lingkungan yang lebih baik sebagai upaya menjaga reputasi kelembagaan.

Tekanan DPRD terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan TJSL, sejalan dengan penelitian Novianti & Eriandani, (2022), yang menunjukkan bahwa ukuran komisisaris positif signifikan terhadap pengungkapan TJSL. Temuan ini menegaskan bahwa peran legislatif tidak hanya terbatas pada fungsi legislasi dan penganggaran, akan tetapi juga mencakup pengawasan aktif terhadap kinerja pemerintah daerah. Tekanan politik dari DPRD dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti rekomendasi, kritik dalam rapat kerja, evaluasi laporan pertanggungjawaban, hingga tekanan politik yang lebih eksplisit.

Tekanan KLHK terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan TJSL, sejalan dengan penelitian (Istifarah & Subardjo, 2017), yang menunjukkan bahwa penghargaan lingkungan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Temuan ini mengindikasikan bahwa tekanan vertikal dari pemerintah pusat khususnya melalui kementerian, memiliki peran krusial dalam mengarahkan dan mengawasi agenda lingkungan yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Melalui mekanisme regulasi, pedoman teknis, monitoring dan kewenangan pemberian insentif maupun sanksi, KLHK memberikan tekanan formal kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan program-program yang relevan dengan keberlanjutan lingkungan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh tekanan pemangku kepentingan terhadap pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada pemerintah daerah di Indonesia. Berdasarkan pengujian terhadap 513 pemerintah kabupaten/kota yang dianalisis melalui regresi linier berganda, diperoleh bukti empiris bahwa tekanan masyarakat, tekanan media, tekanan DPRD serta tekanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan TJSL yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Temuan berupa koefisien yang bersifat positif dan tingkat signifikansi yang konsisten menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat tekanan publik, baik melalui partisipasi sosial, pemberitaan, pengawasan legislatif maupun dorongan regulatif vertikal, maka semakin meningkat kecenderungan pemerintah daerah untuk mempublikasikan aktivitas TJSL mereka pada situs resmi.

Di sisi lain, variabel kontrol berupa APBD dan PAD tidak menunjukkan pengaruh signifikan sehingga kapasitas fiskal tidak menjadi determinan utama dalam menjelaskan variasi tingkat pengungkapan TJSL. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pengungkapan TJSL bukan semata-mata bergantung pada kemampuan fiskal yang dimiliki suatu daerah, melainkan lebih dipengaruhi oleh intensitas tuntutan publik serta tekanan kelembagaan yang mendorong pemerintah daerah

untuk menunjukkan komitmen transparansi kepada masyarakat.. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme kelembagaan, sosial, dan regulatif memainkan peran penting dalam membentuk perilaku transparansi pemerintah daerah terkait isu sosial dan lingkungan, meskipun masih terdapat faktor lain di luar model yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan tersebut.

5.2. Implikasi

5.2.1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori pemangku kepentingan dalam konteks sektor publik di Indonesia. Temuan bahwa tekanan masyarakat, media, DPRD, dan kementerian lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan TJSL menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya merespons kewajiban administratif, tetapi juga tekanan legitimasi yang berasal dari lingkungan eksternal. Kondisi ini mendukung premis dalam teori pemangku kepentingan bahwa organisasi publik akan mengambil tindakan untuk memenuhi ekspektasi pihak-pihak berkepentingan guna mempertahankan penerimaan sosial (social acceptance) dan legitimasi kelembagaan. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai bagaimana mekanisme tekanan normatif, koersif, dan sosial mempengaruhi perilaku transparansi

dalam pengelolaan isu lingkungan dan sosial di sektor pemerintahan Indonesia.

5.2.2. Implikasi Praktis

Dari sisi praktik pemerintahan daerah, hasil penelitian ini memberikan sejumlah konsekuensi kebijakan. Pertama, karena tekanan masyarakat dan perhatian publik terbukti berpengaruh positif terhadap pengungkapan TJSL, maka pemerintah daerah perlu memperluas ruang partisipasi masyarakat melalui akses informasi yang lebih mudah serta edukasi publik terkait isu sosial dan lingkungan. Kedua, peran media yang signifikan mengindikasikan bahwa kanal informasi digital milik pemerintah harus diperkuat agar komunikasi mengenai program lingkungan dan sosial dapat dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses. Ketiga, temuan bahwa DPRD berpengaruh terhadap pengungkapan TJSL menunjukkan pentingnya optimalisasi fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di daerah. Keempat, keterlibatan kementerian lingkungan memiliki implikasi bahwa mekanisme regulatif dan program pengawasan dari pemerintah pusat perlu terus diperkuat agar dapat memberikan insentif dan pengawasan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi TJSL.

5.3. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasilnya, yaitu:

1. Pengukuran variabel tekanan masyarakat menggunakan indikator rata-rata tingkat pendidikan masyarakat sehingga belum sepenuhnya mampu menangkap bentuk tekanan sosial secara menyeluruh. Tekanan publik dalam konteks pelaksanaan program lingkungan dan sosial tidak hanya berasal dari aspek pendidikan, tetapi dapat pula terbentuk dari protes sosial, tuntutan masyarakat, kampanye lingkungan, atau partisipasi langsung dalam forum kebijakan.
2. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional sehingga hasil yang diperoleh hanya menjelaskan kondisi dalam satu periode waktu tertentu. Dengan demikian, efek perubahan kebijakan, dinamika politik daerah, atau siklus anggaran yang mungkin menyebabkan perubahan pengungkapan TJSL tidak dapat diamati dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian lanjutan disarankan untuk:

1. Memperluas indikator pengukuran tekanan masyarakat, misalnya dengan memasukkan variabel partisipasi publik, tingkat advokasi lingkungan, keterlibatan LSM, serta data terkait aspirasi masyarakat melalui kanal resmi pengaduan pemerintah.
2. Selain itu, penggunaan data longitudinal atau pendekatan panel data dapat memberikan gambaran hubungan yang lebih kuat terkait dinamika tekanan

pemangku kepentingan terhadap pengungkapan TJSL dalam jangka waktu tertentu.

3. Pendekatan kualitatif seperti wawancara mendalam dengan pejabat daerah atau aktivis lingkungan juga dapat dilakukan untuk memahami mekanisme internalisasi tekanan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan terkait pelaporan TJSL.

Dengan pengembangan variabel dan metode tersebut, penelitian ke depan diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendorong transparansi lingkungan dan sosial pemerintah daerah di Indonesia.

REFERENSI

- Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Taqwin, Masita, Ardiawan, K. N., & Sari, M. E. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (N. Saputra (ed.)). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Amalia, E. (2020). Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(2), 71–95.
- Ardiansyah, I. (2021). Analisis Stakeholder dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Wisata Alam Gunung Pancar Kabupaten Bogor. *Imam Ardiansyah*, 6(1).
- Astri, H. (2012). Pemanfaatan Corporate Social Responsibility Bagi Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. *Jurnal Aspirasi*, 3(2), 152.
- Basir, I., Ansari, M. I., & Fitriani, N. (2024). Urgensi sustainability reporting pada pemerintah daerah: sebuah analisis studi wacana. *Jurnal Proaksi*, 11(4), 805–816.
- Basuki, B., & Patrioty, C. N. (2009). Pengaruh Regulasi Pemerintah, Tekanan Masyarakat, Tekanan Organisasi Lingkungan, Tekanan Media Massa, Terhadap Corporate Social Disclosure. *EKUITAS*, 10, 23–40.
- Diamastuti, E., Muafi, Fitri, A., & Faizaty, N. E. (2021). The Role of Corporate Governance in the Corporate Social and Environmental Responsibility Disclosure. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(1), 187–198.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management*. Pitman Publisihing Inc.
- Handoko, J., & Santoso, V. (2023). Pengaruh Akuntansi Hijau dan Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan dengan Tanggung Jawab Sosial sebagai Pemediasi. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 12(1), 84–101.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In H. Abadi (Ed.), *CV. Pustaka Ilmu Group* (1st ed.).
- Harlyandra, Y., & Kafaa, K. A. (2021). Kolaborasi multi-stakeholder pada praktik corporate social responsibility dalam penanganan sampah di Desa Pengarengan Kabupaten Cirebon. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 6(1), 54–68.
- Harsono, K., Sari, P. Y., & Rosdini, D. (2024). The Influence of Good Corporate Governance and Stakeholder Pressure on the Quality of Sustainability Report Disclosure. *Budapest International Research and Critics Institute Journal*, 7(1), 252–267.

- Herlina, Aziza, N., & Ilyas, F. (2016). Determinan Kebijakan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan. *Jurnal Fairness*, 6(2), 83–96.
- Heyes, A., & Kapur, S. (2012). Community pressure for green behavior. *Journal of Environmental Economics and Management*, 64, 427–441.
- Hidayah, N., Hutagalung, S. S., & Hermawan, D. (2019). Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Objek Pariwisata Alam Dan Sejarah Di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Administrasi Publik*, 55–71.
- Iba, Z., & Wardhana, A. (2024). *Regresi Linier Sederhana dan Berganda* (M. Pradana (ed.); Issue July). Eureka Media Aksana.
- Istifaroh, A., & Subardjo, A. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(6), 1–19.
- Karjoko, L., Santosa, J., & Rachmi Handayani, I. G. A. K. (2019). Disfungsi Peraturan Perundang-Undangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 305–325.
- Kholis, A. (2020). Corporate Social Responsibility Konsep dan Implementasi. In *Economic & Business Publishing*.
- Machali, I. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif* (A. Q. Habib (ed.); 3rd ed.). Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muin, A. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian Kuantitatif* (1st ed.). CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Musa, N. K. M. (2024). Urgensi kolaborasi stakeholder dalam mewujudkan akuntansi lingkungan. *Environmental, Social, Governance and Sustainable Business*, 1(2), 88–110.
- Novianti, N., & Eriandani, R. (2022). Pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 18(1), 208–216.
- Novianti, R., & Meiden, C. (2025). Pengaruh Stakeholder Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure Atas Sektor Perusahaan Indes LQ45 & ESG Leader. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 44–52.
- Octavio, M. F. R., & Urumsah, D. (2024). Exploring Factors Influencing Digital Transparency in Local Governments: Practices in Indonesia. *Jurnal Dinamika*

Akuntansi Dan Bisnis, 11(2), 279–296.

- Pratama, J. H., & Soenaria, S. R. (2024). Pengungkapan Kinerja Sosial pada Aspek Sosial Instansi Pemerintah Daerah Melalui Laporan Keberlanjutan Berbasis Global Reporting Initiative (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(3), 415–433.
- Ramadhini, A., Adhariani, D., & Djakman, C. D. (2020). The Effects of External Stakeholder Pressure on CSR Disclosure: Evidence from Indonesia. *DLSU Business and Economics Review*, 29(2), 29–39.
- Rinaldi, M., Sudirman, S. R., & Ramadhani, M. A. (2024). Kinerja Lingkungan, Dewan Komisaris Independen dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility: Tinjauan pada Konteks Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar dan Kimia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(4), 755–763.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian* (T. Koryati (ed.); 1st ed.). Penerbit KBM Indonesia.
- Santo, G. I., & Rahayuningsih, D. A. (2022). Karakteristik Perusahaan Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 24(1), 171–184.
- Sarra, H. D., & Alamsyah, S. (2020). Pengaruh Kinerja Lingkungan, Citra Perusahaan dan Media Exposure Terhadap Pengungkapan CSR. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)*, 2, 410–417.
- Sawitri, A. P., & Ardhiani, M. R. (2023). Tekanan Pemangku Kepentingan, Good Corporate Governance dan Kualitas Sustainability Report Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 7(1), 26–33. <https://doi.org/10.31851/neraca.v7i1.9557>
- Setiawati, D., Soepatini, Febriani, H., & Anggraeni, C. (2024). Transparency and Accountability in Corporate Social Responsibility Programs : Local Government Oversight Through a Business Law Perspective. *Law and Justice*, 9(1), 205–217.
- Soesana, A., Subakti, H., Salamun, S., Tasrim, I. W., Karwanto, K., Falani, I., Bukidz, D. P., & Pasaribu, A. N. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (A. Karim (ed.); 1st ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Sriningsih, & Wahyuningrum, I. F. S. (2022). Pengaruh Comprehensive Stakeholder Pressure dan Good Corporate Governance terhadap Kualitas Sustainability Report. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 813–827.

- Subroto, V. K., & Endaryati, E. (2023). Kumpulan Teori Akuntansi. In *Yayasan Prima Agus Teknik*.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (19th ed.). Penerbit Alfabeta.
- Suryana, I. M., & Setyany, E. (2023). Effect of Stakeholder Pressure and Corporate Governance on Sustainability Reports Disclosure: Empirical Study on Mining Sector Companies in Indonesia. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 5(2), 59–67.
- Syahirah1, S. N., Suharman, H., Hasyir, D. A., & Saputra, J. (2023). Good Corporate Governance, Stakeholders, and Sustainability Report Disclosure. *Khazanah Sosial*, 5(4), 672–687.
- Tiono, V. A., Wijaya, H., & Merida, P. D. (2022). Pengaruh Slack Resources, Media Exposure Dan Sensitivitas Industri Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(1), 48–57.
- Wahyuningrum, I. F. S., Ihlashul'amal, M., Hidayah, R., & Rizkyana, F. W. (2023). Stakeholder Pressure and Its Effect on Sustainability Report. *Jurnal Presipitasi*, 20(2), 494–506.
- Waruwu, M., Pu'at, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 917–932.
- Wijaya, M. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 26–31.
- Wulan, D. F. (2025). Stakeholder Pressure and Sustainability Report Quality in Indonesia. *International Journal of Management and Human Sciences*, 9(1), 01–13.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Indeks Pengukuran TJSL

<i>Perspective</i>	<i>Element</i>	<i>Code</i>	<i>Measurement</i>
<i>Environment</i>	Isu lingkungan dalam visi, misi, tujuan, atau simbol daerah.	E1	Visi/misi daerah mencantumkan istilah seperti berkelanjutan, go green, atau simbol lingkungan, dan sebagainya.
	Kegiatan/program lingkungan.	E2	Website menampilkan kegiatan /program lingkungan (contoh: reboisasi, pengelolaan sampah terpadu, penghematan energi, dan sebagainya).
	Publikasi isu lingkungan.	E3	Ada berita, artikel, atau publikasi kegiatan lingkungan di website.
	Kemitraan lingkungan dengan Perusahaan.	E4	Website memuat informasi kerja sama pemerintah daerah dengan perusahaan (BUMN/BUMD/swasta) dalam kegiatan seperti penghijauan, pengelolaan limbah, atau energi bersih, dan sebagainya.
	Pelibatan stakeholder. dalam isu lingkungan.	E5	Ada forum diskusi, konsultasi publik, atau interaksi pada website resmi.
	Penghargaan di bidang lingkungan.	E6	Website memuat informasi penghargaan lingkungan.
	Informasi unit/instansi lingkungan.	E7	Website menyebutkan Dinas Lingkungan Hidup atau unit terkait.

<i>Perspective</i>	<i>Element</i>	<i>Code</i>	<i>Measurement</i>
	Kontak pengaduan lingkungan.	E8	Website mencantumkan kontak resmi untuk isu lingkungan.
<i>Social</i>	Isu sosial dalam visi, misi, tujuan, atau simbol daerah.	S1	Visi/misi daerah mencantumkan istilah seperti berkeadilan sosial, sejahtera, kesehatan masyarakat, dan sebagainya.
	Kegiatan/program sosial.	S2	Website menampilkan kegiatan /program sosial (contoh: program kesehatan, atau pendidikan masyarakat, bantuan sosial, dan sebagainya).
	Kemitraan sosial dengan perusahaan.	S3	Website memuat informasi kerja sama pemerintah daerah dengan perusahaan (BUMN/BUMD/swasta) dalam kegiatan seperti bantuan kesehatan, pendidikan masyarakat, bantuan sosial, dan sebagainya).
	Publikasi isu sosial.	S4	Website menampilkan berita/artikel tentang kegiatan sosial daerah.
	Pelibatan stakeholder dalam isu sosial.	S5	Website menampilkan forum diskusi, konsultasi publik, atau interaksi media sosial terkait isu sosial.
	Penghargaan di bidang sosial.	S6	Website memuat penghargaan terkait pelayanan sosial atau kesejahteraan.
	Informasi unit/instansi sosial.	S7	Website menyebutkan Dinas Sosial atau instansi terkait.

<i>Perspective</i>	<i>Element</i>	<i>Code</i>	<i>Measurement</i>
	Kontak pengaduan Sosial.	S8	Website mencantumkan kontak resmi layanan sosial.
Transparency Assesement Indicator	Memiliki situs web resmi yang dapat diakses secara publik.	TAI 1	Kemudahan membuka konten apa pun di situs web resmi pemerintah Daerah, artinya ketika dibuka langsung menuju bagian yang diinginkan.
	Memiliki situs web yang sering diperbarui.	TAI 2	1. Menyajikan berita terkini, setidaknya berita dari satu tahun terakhir, 2. Ketepatan waktu dalam mengunggah konten berita, yang berarti berita pada tahun tersebut juga diunggah pada tahun itu.
	Pengungkapan dokumen.	TAI 3	Transparansi informasi mengenai Dokumen Pelaksanaan Anggaran, laporan keuangan, dan sebagainya dengan jelas dan lengkap.

Sumber: (Joseph, 2014), (Tubay & Leon, 2020), (Puspitasari et al., 2023).

Lampiran 2. Kabupaten/Kota di Indonesia

No.	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Aceh Barat	258	Kota Malang
2	Kabupaten Aceh Barat Daya	259	Kota Mojokerto
3	Kabupaten Aceh Besar	260	Kota Pasuruan
4	Kabupaten Aceh Jaya	261	Kota Probolinggo
5	Kabupaten Aceh Selatan	262	Kota Surabaya
6	Kabupaten Aceh Singkil	263	Kota Administrasi Jakarta Barat
7	Kabupaten Aceh Tamiang	264	Kota Administrasi Jakarta Pusat
8	Kabupaten Aceh Tengah	265	Kota Administrasi Jakarta Selatan
9	Kabupaten Aceh Tenggara	266	Kota Administrasi Jakarta Timur
10	Kabupaten Aceh Timur	267	Kota Administrasi Jakarta Utara
11	Kabupaten Aceh Utara	268	Kabupaten Bantul
12	Kabupaten Bener Meriah	269	Kabupaten Gunungkidul
13	Kabupaten Bireuen	270	Kabupaten Kulon Progo
14	Kabupaten Gayo Lues	271	Kabupaten Sleman
15	Kabupaten Nagan Raya	272	Kota Yogyakarta
16	Kabupaten Pidie	273	Kabupaten Badung
17	Kabupaten Pidie Jaya	274	Kabupaten Bangli
18	Kabupaten Simeulue	275	Kabupaten Buleleng
19	Kota Banda Aceh	276	Kabupaten Gianyar
20	Kota Langsa	277	Kabupaten Jembrana
21	Kota Lhokseumawe	278	Kabupaten Karangasem
22	Kota Sabang	279	Kabupaten Klungkung

No.	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
23	Kota Subulussalam	280	Kabupaten Tabanan
24	Kabupaten Asahan	281	Kota Denpasar
25	Kabupaten Batubara	282	Kabupaten Bima
26	Kabupaten Dairi	283	Kabupaten Dompu
27	Kabupaten Deli Serdang	284	Kabupaten Lombok Barat
28	Kabupaten Humbang Hasundutan	285	Kabupaten Lombok Tengah
29	Kabupaten Karo	286	Kabupaten Lombok Timur
30	Kabupaten Labuhanbatu	287	Kabupaten Lombok Utara
31	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	288	Kabupaten Sumbawa
32	Kabupaten Labuhanbatu Utara	289	Kabupaten Sumbawa Barat
33	Kabupaten Langkat	290	Kota Bima
34	Kabupaten Mandailing Natal	291	Kota Mataram
35	Kabupaten Nias	292	Kabupaten Alor
36	Kabupaten Nias Barat	293	Kabupaten Belu
37	Kabupaten Nias Selatan	294	Kabupaten Ende
38	Kabupaten Nias Utara	295	Kabupaten Flores Timur
39	Kabupaten Padang Lawas	296	Kabupaten Kupang
40	Kabupaten Padang Lawas Utara	297	Kabupaten Lembata
41	Kabupaten Pakpak Bharat	298	Kabupaten Malaka
42	Kabupaten Samosir	299	Kabupaten Manggarai
43	Kabupaten Serdang Bedagai	300	Kabupaten Manggarai Barat
44	Kabupaten Simalungun	301	Kabupaten Manggarai Timur
45	Kabupaten Tapanuli Selatan	302	Kabupaten Ngada

No.	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
46	Kabupaten Tapanuli Tengah	303	Kabupaten Nagekeo
47	Kabupaten Tapanuli Utara	304	Kabupaten Rote Ndao
48	Kabupaten Toba Samosir	305	Kabupaten Sabu Raijua
49	Kota Binjai	306	Kabupaten Sikka
50	Kota Gunungsitoli	307	Kabupaten Sumba Barat
51	Kota Medan	308	Kabupaten Sumba Barat Daya
52	Kota Padangsidempuan	309	Kabupaten Sumba Tengah
53	Kota Pematangsiantar	310	Kabupaten Sumba Timur
54	Kota Sibolga	311	Kabupaten Timor Tengah Selatan
55	Kota Tanjungbalai	312	Kabupaten Timor Tengah Utara
56	Kota Tebing Tinggi	313	Kota Kupang
57	Kabupaten Agam	314	Kabupaten Bengkayang
58	Kabupaten Dharmasraya	315	Kabupaten Kapuas Hulu
59	Kabupaten Kepulauan Mentawai	316	Kabupaten Kayong Utara
60	Kabupaten Lima Puluh Kota	317	Kabupaten Ketapang
61	Kabupaten Padang Pariaman	318	Kabupaten Kubu Raya
62	Kabupaten Pasaman	319	Kabupaten Landak
63	Kabupaten Pasaman Barat	320	Kabupaten Melawi
64	Kabupaten Pesisir Selatan	321	Kabupaten Mempawah
65	Kabupaten Sijunjung	322	Kabupaten Sambas
66	Kabupaten Solok	323	Kabupaten Sanggau
67	Kabupaten Solok Selatan	324	Kabupaten Sekadau
68	Kabupaten Tanah Datar	325	Kabupaten Sintang

No.	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
69	Kota Bukittinggi	326	Kota Pontianak
70	Kota Padang	327	Kota Singkawang
71	Kota Padangpanjang	328	Kabupaten Balangan
72	Kota Pariaman	329	Kabupaten Banjar
73	Kota Payakumbuh	330	Kabupaten Barito Kuala
74	Kota Sawahlunto	331	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
75	Kota Solok	332	Kabupaten Hulu Sungai Tengah
76	Kabupaten Banyuasin	333	Kabupaten Hulu Sungai Utara
77	Kabupaten Empat Lawang	334	Kabupaten Kotabaru
78	Kabupaten Lahat	335	Kabupaten Tabalong
79	Kabupaten Muara Enim	336	Kabupaten Tanah Bumbu
80	Kabupaten Musi Banyuasin	337	Kabupaten Tanah Laut
81	Kabupaten Musi Rawas	338	Kabupaten Tapin
82	Kabupaten Musi Rawas Utara	339	Kota Banjarbaru
83	Kabupaten Ogan Ilir	340	Kota Banjarmasin
84	Kabupaten Ogan Komering Ilir	341	Kabupaten Barito Selatan
85	Kabupaten Ogan Komering Ulu	342	Kabupaten Barito Timur
86	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	343	Kabupaten Barito Utara
87	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	344	Kabupaten Gunung Mas
88	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	345	Kabupaten Kapuas

No.	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
89	Kota Lubuklinggau	346	Kabupaten Katingan
90	Kota Pagar Alam	347	Kabupaten Kotawaringin Barat
91	Kota Palembang	348	Kabupaten Kotawaringin Timur
92	Kota Prabumulih	349	Kabupaten Lamandau
93	Kabupaten Bengkalis	350	Kabupaten Murung Raya
94	Kabupaten Indragiri Hilir	351	Kabupaten Pulang Pisau
95	Kabupaten Indragiri Hulu	352	Kabupaten Sukamara
96	Kabupaten Kampar	353	Kabupaten Seruyan
97	Kabupaten Kepulauan Meranti	354	Kota Palangka Raya
98	Kabupaten Kuantan Singingi	355	Kabupaten Berau
99	Kabupaten Pelalawan	356	Kabupaten Kutai Barat
100	Kabupaten Rokan Hilir	357	Kabupaten Kutai Kartanegara
101	Kabupaten Rokan Hulu	358	Kabupaten Kutai Timur
102	Kabupaten Siak	359	Kabupaten Mahakam Ulu
103	Kota Dumai	360	Kabupaten Paser
104	Kota Pekanbaru	361	Kabupaten Penajam Paser Utara
105	Kabupaten Bintan	362	Kota Balikpapan
106	Kabupaten Karimun	363	Kota Bontang
107	Kabupaten Kepulauan Anambas	364	Kota Samarinda
108	Kabupaten Lingga	365	Kabupaten Bulungan
109	Kabupaten Natuna	366	Kabupaten Malinau
110	Kota Batam	367	Kabupaten Nunukan
111	Kota Tanjung Pinang	368	Kabupaten Tana Tidung

No.	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
112	Kabupaten Batanghari	369	Kota Tarakan
113	Kabupaten Bungo	370	Kabupaten Boalemo
114	Kabupaten Kerinci	371	Kabupaten Bone Bolango
115	Kabupaten Merangin	372	Kabupaten Gorontalo
116	Kabupaten Muaro Jambi	373	Kabupaten Gorontalo Utara
117	Kabupaten Sarolangun	374	Kabupaten Pohuwato
118	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	375	Kota Gorontalo
119	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	376	Kabupaten Bantaeng
120	Kabupaten Tebo	377	Kabupaten Barru
121	Kota Jambi	378	Kabupaten Bone
122	Kota Sungai Penuh	379	Kabupaten Bulukumba
123	Kabupaten Bengkulu Selatan	380	Kabupaten Enrekang
124	Kabupaten Bengkulu Tengah	381	Kabupaten Gowa
125	Kabupaten Bengkulu Utara	382	Kabupaten Jenepono
126	Kabupaten Kaur	383	Kabupaten Kepulauan Selayar
127	Kabupaten Kepahiang	384	Kabupaten Luwu
128	Kabupaten Lebong	385	Kabupaten Luwu Timur
129	Kabupaten Mukomuko	386	Kabupaten Luwu Utara
130	Kabupaten Rejang Lebong	387	Kabupaten Maros
131	Kabupaten Seluma	388	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
132	Kota Bengkulu	389	Kabupaten Pinrang
133	Kabupaten Bangka	390	Kabupaten Sidenreng Rappang
134	Kabupaten Bangka Barat	391	Kabupaten Sinjai

No.	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
135	Kabupaten Bangka Selatan	392	Kabupaten Soppeng
136	Kabupaten Bangka Tengah	393	Kabupaten Takalar
137	Kabupaten Belitung	394	Kabupaten Tana Toraja
138	Kabupaten Belitung Timur	395	Kabupaten Toraja Utara
139	Kota Pangkal Pinang	396	Kabupaten Wajo
140	Kabupaten Lampung Tengah	397	Kota Makassar
141	Kabupaten Lampung Utara	398	Kota Palopo
142	Kabupaten Lampung Selatan	399	Kota Parepare
143	Kabupaten Lampung Barat	400	Kabupaten Bombana
144	Kabupaten Lampung Timur	401	Kabupaten Buton
145	Kabupaten Mesuji	402	Kabupaten Buton Selatan
146	Kabupaten Pesawaran	403	Kabupaten Buton Tengah
147	Kabupaten Pesisir Barat	404	Kabupaten Buton Utara
148	Kabupaten Pringsewu	405	Kabupaten Kolaka
149	Kabupaten Tulang Bawang	406	Kabupaten Kolaka Timur
150	Kabupaten Tulang Bawang Barat	407	Kabupaten Kolaka Utara
151	Kabupaten Tanggamus	408	Kabupaten Konawe
152	Kabupaten Way Kanan	409	Kabupaten Konawe Kepulauan
153	Kota Bandar Lampung	410	Kabupaten Konawe Selatan
154	Kota Metro	411	Kabupaten Konawe Utara
155	Kabupaten Lebak	412	Kabupaten Muna
156	Kabupaten Pandeglang	413	Kabupaten Muna Barat
157	Kabupaten Serang	414	Kabupaten Wakatobi

No.	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
158	Kabupaten Tangerang	415	Kota Bau-Bau
159	Kota Cilegon	416	Kota Kendari
160	Kota Serang	417	Kabupaten Banggai
161	Kota Tangerang	418	Kabupaten Banggai Kepulauan
162	Kota Tangerang Selatan	419	Kabupaten Banggai Laut
163	Kabupaten Bandung	420	Kabupaten Buol
164	Kabupaten Bandung Barat	421	Kabupaten Donggala
165	Kabupaten Bekasi	422	Kabupaten Morowali
166	Kabupaten Bogor	423	Kabupaten Morowali Utara
167	Kabupaten Ciamis	424	Kabupaten Parigi Moutong
168	Kabupaten Cianjur	425	Kabupaten Poso
169	Kabupaten Cirebon	426	Kabupaten Sigi
170	Kabupaten Garut	427	Kabupaten Tojo Una-Una
171	Kabupaten Indramayu	428	Kabupaten Toli-Toli
172	Kabupaten Karawang	429	Kota Palu
173	Kabupaten Kuningan	430	Kabupaten Bolaang Mongondow
174	Kabupaten Majalengka	431	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
175	Kabupaten Pangandaran	432	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
176	Kabupaten Purwakarta	433	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
177	Kabupaten Subang	434	Kabupaten Kepulauan Sangihe
178	Kabupaten Sukabumi	435	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
179	Kabupaten Sumedang	436	Kabupaten Kepulauan Talaud

No.	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
180	Kabupaten Tasikmalaya	437	Kabupaten Minahasa
181	Kota Bandung	438	Kabupaten Minahasa Selatan
182	Kota Banjar	439	Kabupaten Minahasa Tenggara
183	Kota Bekasi	440	Kabupaten Minahasa Utara
184	Kota Bogor	441	Kota Bitung
185	Kota Cimahi	442	Kota Kotamobagu
186	Kota Cirebon	443	Kota Manado
187	Kota Depok	444	Kota Tomohon
188	Kota Sukabumi	445	Kabupaten Majene
189	Kota Tasikmalaya	446	Kabupaten Mamasa
190	Kabupaten Banjarnegara	447	Kabupaten Mamuju
191	Kabupaten Banyumas	448	Kabupaten Mamuju Tengah
192	Kabupaten Batang	449	Kabupaten Mamuju Utara
193	Kabupaten Blora	450	Kabupaten Polewali Mandar
194	Kabupaten Boyolali	451	Kabupaten Buru
195	Kabupaten Brebes	452	Kabupaten Buru Selatan
196	Kabupaten Cilacap	453	Kabupaten Kepulauan Aru
197	Kabupaten Demak	454	Kabupaten Maluku Barat Daya
198	Kabupaten Grobogan	455	Kabupaten Maluku Tengah
199	Kabupaten Jepara	456	Kabupaten Maluku Tenggara
200	Kabupaten Karanganyar	457	Kabupaten Maluku Tenggara Barat
201	Kabupaten Kebumen	458	Kabupaten Seram Bagian Barat
202	Kabupaten Kendal	459	Kabupaten Seram Bagian Timur

No.	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
203	Kabupaten Klaten	460	Kota Ambon
204	Kabupaten Kudus	461	Kota Tual
205	Kabupaten Magelang	462	Kabupaten Halmahera Barat
206	Kabupaten Pati	463	Kabupaten Halmahera Tengah
207	Kabupaten Pekalongan	464	Kabupaten Halmahera Utara
208	Kabupaten Pemalang	465	Kabupaten Halmahera Selatan
209	Kabupaten Purbalingga	466	Kabupaten Kepulauan Sula
210	Kabupaten Purworejo	467	Kabupaten Halmahera Timur
211	Kabupaten Rembang	468	Kabupaten Pulau Morotai
212	Kabupaten Semarang	469	Kabupaten Pulau Taliabu
213	Kabupaten Sragen	470	Kota Ternate
214	Kabupaten Sukoharjo	471	Kota Tidore Kepulauan
215	Kabupaten Tegal	472	Kabupaten Asmat
216	Kabupaten Temanggung	473	Kabupaten Biak Numfor
217	Kabupaten Wonogiri	474	Kabupaten Boven Digoel
218	Kabupaten Wonosobo	475	Kabupaten Deiyai
219	Kota Magelang	476	Kabupaten Dogiyai
220	Kota Pekalongan	477	Kabupaten Intan Jaya
221	Kota Salatiga	478	Kabupaten Jayapura
222	Kota Semarang	479	Kabupaten Jayawijaya
223	Kota Surakarta	480	Kabupaten Keerom
224	Kota Tegal	481	Kabupaten Kepulauan Yapen
225	Kabupaten Bangkalan	482	Kabupaten Lanny Jaya

No.	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
226	Kabupaten Banyuwangi	483	Kabupaten Mamberamo Raya
227	Kabupaten Blitar	484	Kabupaten Mamberamo Tengah
228	Kabupaten Bojonegoro	485	Kabupaten Mappi
229	Kabupaten Bondowoso	486	Kabupaten Merauke
230	Kabupaten Gresik	487	Kabupaten Mimika
231	Kabupaten Jember	488	Kabupaten Nabire
232	Kabupaten Jombang	489	Kabupaten Nduga
233	Kabupaten Kediri	490	Kabupaten Paniai
234	Kabupaten Lamongan	491	Kabupaten Pegunungan Bintang
235	Kabupaten Lumajang	492	Kabupaten Puncak
236	Kabupaten Madiun	493	Kabupaten Puncak Jaya
237	Kabupaten Magetan	494	Kabupaten Sarmi
238	Kabupaten Malang	495	Kabupaten Supiori
239	Kabupaten Mojokerto	496	Kabupaten Tolikara
240	Kabupaten Nganjuk	497	Kabupaten Waropen
241	Kabupaten Ngawi	498	Kabupaten Yahukimo
242	Kabupaten Pacitan	499	Kabupaten Yalimo
243	Kabupaten Pamekasan	500	Kota Jayapura
244	Kabupaten Pasuruan	501	Kabupaten Fakfak
245	Kabupaten Ponorogo	502	Kabupaten Kaimana
246	Kabupaten Probolinggo	503	Kabupaten Manokwari
247	Kabupaten Sampang	504	Kabupaten Manokwari Selatan
248	Kabupaten Sidoarjo	505	Kabupaten Maybrat

No.	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
249	Kabupaten Situbondo	506	Kabupaten Pegunungan Arfak
250	Kabupaten Sumenep	507	Kabupaten Raja Ampat
251	Kabupaten Trenggalek	508	Kabupaten Sorong
252	Kabupaten Tuban	509	Kabupaten Sorong Selatan
253	Kabupaten Tulungagung	510	Kabupaten Tambrau
254	Kota Batu	511	Kabupaten Teluk Bintuni
255	Kota Blitar	512	Kabupaten Teluk Wondama
256	Kota Kediri	513	Kota Sorong
257	Kota Madiun		

Sumber: Badan Pusat Statistik.